

**SKRIPSI**



**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA MAKASSAR**

Oleh  
**INDAH ALFIANI**  
**B111 12 325**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**INDAH ALFIANI  
NIM B 111 12 325**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 11 Agustus 2016  
dan Dinyatakan Lulus

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 199702 2 001

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH ALFIANI

Nomor Pokok : B111 12 325

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 31 Mei 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125199702 2 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: INDAH ALFIANI
Nomor Pokok	: B11112325
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2016

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

INDAH ALFIANI (B111 12 325). *Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar*. (Dibimbing oleh Muhadar selaku Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan dan pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan adalah lemahnya kondisi perekonomian di Indonesia, adanya oknum-oknum penegak hukum yang melakukan kolusi, dan sulitnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Hatta dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar melalui pengawasan terhadap barang ekspor dan barang impor yang masuk dan keluar Pelabuhan Hatta berdasarkan manajemen resiko yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem penjaluran. Kekurangan dalam pengawasan barang ekspor dan impor di Pelabuhan Hatta adalah belum ada alat pemeriksa peti kemas seperti *Gamma Ray*, *Hi-Co Scan Double*, dan *X-Ray Inspection System*.

## ABSTRACT

INDAH ALFIANI (B111 12 325). *Customs Crimes Prevention in Soekarno Hatta Port of Makassar*. (Advised by Muhadar as the first advisor and Wiwie Heryani as the second advisor).

This research aims to know the causal factor that giving rise to customs crime and the prevention of customs crime in Soekarno Hatta Port of Makassar. This research based on field research and using qualitative research method. Research was conducted in Customs Office Surveillance and Service Type B of Makassar and Soekarno Hatta Port of Makassar.

The result of this research find that the causal factors of customs crime are the weakness in Indonesian economic condition, there are law executor agents which is committing collusion, and difficulties in surveillance Indonesia territorial sea. Prevention of customs crime in Hatta Port was conducted by Customs Office Surveillance and Service Type B of Makassar with surveillance to eksport and import goods which is enter and exit from Hatta Port based on risk management that is applied by Directorate General of Customs and Excise by using track system. The weakness of eksport and import goods surveillance in Hatta Port is they have not owning container examiner tool such as *Gamma Ray, Hi-Co Scan Double, dan X-Ray Inspection System*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan kasih sayang-Nyalah saya bisa sampai di “titik” di mana saya berada saat ini, di saat saya hampir putus asa, Allah selalu memberikan jalan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Terima kasih kepada orang tua saya yang telah membawa saya sampai di “titik” di mana saya berada saat ini. Terima kasih kepada adik saya yang selalu membuat hari-hari saya di rumah lebih hidup.

Ucapan terima kasih saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II atas waktu telah diluangkan, serta bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini;
3. Dewan Penguji, Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, dan H.M. Imran Arief, S.H., M.H, yang telah memberikan saya saran-saran dan arahan-arahan dalam melaksanakan penelitian;
4. Penasehat Akademik saya, Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H dan Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H;



5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada saya;
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pegawai-Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Kepada sahabat yang saya sayangi, Marwah dan keluarga kecilnya, suaminya Syahrul, dan si kembar yang baru lahir, Nafiza dan Naseri;
8. Sahabat-sahabat yang juga saya sayangi yang selalu ada untuk saya, di saat senang terutama di saat susah Andini Hayrunnisyah, Iselda Nur Istiqomah, Musdalifah Amin, Rahmi Firdasari, dan Rahma Yani;
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membuat hari-hari saya berwarna Irma Sari Ramadhani, Nurul Fauziah, Nurjannah, Dina Ledyana; Anastasia; Rizka Dwi Novitriani; Putri Restu AJ, Iin Iryani UH, dan teman-teman lain yang saya tidak tuliskan namanya;
10. Kepada Afdalis dan Reza Haydar atas bantuannya dalam penelitian saya;
11. ALSA LC Unhas atas pengalaman organisasi yang berharga, teman-teman Pengurus Periode 2013-2014, khususnya untuk teman-teman dari Departemen *TMP* yang kece-kece;
12. Kepada Keluarga Besar UKM Karate-Do Gojukai Unit FH-UH, sensei-sensei, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik, khususnya untuk anak-anakku Fay Elizabeth Panglewai dan Rahmawati Kusuma;



13. Pak Madjid, teman-teman, dan senior-senior di *Pioneer English Meeting Club Fort Rotterdam* Makassar,
14. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar atas penerimaan yang baik selama saya melakukan penelitian, utamanya kepada Saudari Tenri dan Nilam dari bagian kepegawaian, Bapak Frengky Palembang, dan Bapak Andi Muh. Reza Hidayat, juga kakak-kakak yang menjadi informan saya dalam wawancara;
15. Kepada pegawai Kantor Pengendali Operasi Terminal Peti Kemas Makassar, Bapak Effendy dan Bapak Yulvan Iwan, teman-teman A. Annisa Dwi Pratiwi dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Muh. Fiqhi Triansyah dari Akademi Maritim Veteran RI Makassar yang sangat baik dan memberikan bantuan selama saya melakukan penelitian;
16. Teman-teman KKN Gel. 90 Kecamatan Segeri khususnya Kelurahan Segeri Pangkep, Fatty Faiqah, Umi Rahma, Jumardi Ladirman, Muh. Imam Imron, dan Burhamzah juga momsiku Andi Jurana Razak.
17. Kepada penulis-penulis lain yang tulisannya menjadi referensi saya dalam mengerjakan skripsi ini, utamanya Ibu Venty Eka Satya dari P3DI Setjend. DPR RI yang telah jauh-jauh mengirimkan buku yang berisi hasil penelitiannya.

Saya menyadari bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam skripsi saya ini, saya berharap ada pengembangan penelitian lebih lanjut

dari penelitian yang telah saya lakukan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari pembaca mengenai skripsi ini, pertanyaan dapat dikirimkan ke alamat email saya indah\_alfiani@yahoo.com . Akhir kalimat, saya berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Makassar, 28 Mei 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pencegahan Kejahatan.....	7
1. Pengertian Pencegahan Kejahatan .....	7
2. Pencegahan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) .....	9
B. Pengertian Tindak Pidana.....	18
C. Kepabeanan .....	23
1. Pengertian Kepabeanan .....	23
2. Fungsi Kepabeanan .....	23
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai Pelaksana Tugas Pokok di Bidang Kepabeanan.....	31

4. Undang-Undang yang Mengatur tentang Kepabeanan di Indonesia.....	35
D. Tindak Pidana Kepabeanan.....	41
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan.....	41
2. Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan .....	49
3. Subjek Tindak Pidana Kepabeanan .....	51
4. Tindak Pidana Kepabeanan sebagai Tindak Pidana Ekonomi .....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Lokasi Penelitian.....	64
B. Jenis dan Sumber Data .....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Ananlisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan .....	66
B. Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.....	85
1. Deskripsi Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar .....	85
2. Pengawasan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Hatta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar .....	87

3. Pengawasan Barang yang Keluar dan Masuk di Terminal Peti Kemas Makassar .....	95
4. Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Hatta .....	98
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	123
B. Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, selain hukum dan politik. Besarnya pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu bangsa. Untuk itu, pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian utama dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

.... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ....

Aktifitas perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Perdagangan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah, juga untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri dengan mengadakan aktifitas jual beli hasil-hasil produksi. Namun, kegiatan perdagangan tidaklah sesederhana sekedar menjual barang untuk meningkatkan perekonomian dan membeli barang untuk memenuhi kebutuhan. Di era globalisasi dan modernisasi ini, aktifitas

perdagangan lebih rumit dan kompleks dengan banyak hal yang mempengaruhinya.

Dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Adapun beberapa hal yang penting dalam perdagangan misalnya mutu barang, pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga agar kegiatan jual beli barang tetap stabil untuk menjaga agar kondisi pasar di suatu wilayah tetap stabil dan masih banyak lagi. Dalam era globalisasi khususnya globalisasi perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar internasional sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, regulasi nasional juga tentu saja harus menyesuaikan diri terhadap aturan internasional. Juga era modernisasi yang harus diikuti dengan berkembangnya teknologi dalam aktivitas perdagangan. Segala hal yang menghambat dan mengganggu aktifitas perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, maupun merugikan keuangan negara perlu diatasi.

Untuk mengakomodir dan menjaga kegiatan perdagangan agar tetap berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mengatur soal aktifitas perdagangan adalah Undang-Undang RI



Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-undang ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.

Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang memiliki dampak yang sangat luas adalah penyelundupan. Dalam bidang ekonomi, penyelundupan di bidang impor membawa dampak negatif bagi industri dalam negeri. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa tahun 2015 industri tekstil dan produk tekstil tumbuh negatif sebesar -6,14 persen, hal ini disebabkan maraknya aksi penyelundupan pakaian bekas, serta penjualan pakaian bekas tersebut secara besar-besaran<sup>1</sup>. Dampak lain penyelundupan adalah masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia secara ilegal, seperti narkoba, senjata api, bahan berbahaya yang bisa mencemarkan maupun merusak lingkungan, bahan peledak, produk-produk yang membahayakan kesehatan, dan lain-lain.

Selama ini, jalur laut masih menjadi sarana yang banyak digunakan untuk melakukan pengiriman barang di samping adanya jalur udara, baik itu antar pulau maupun antar negara, terutama terhadap barang yang dikirimkan dalam jumlah besar. Kegiatan tersebut dilakukan di pelabuhan yang salah satunya fungsinya adalah

---

<sup>1</sup> <http://www.liputan6.com/bisnis/read/2393466/impor-pakaian-bekas-bikin-industri-tekstil-ri-lesu-tahun-ini>

sebagai sarana bongkar muat barang. Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan di pelabuhan yang sudah ditentukan, hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang dibongkar dan dimuat tersebut. Dalam hal ini, kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan pelabuhan yang ditetapkan sebagai kawasan pabean<sup>2</sup>.

Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar adalah salah satu kawasan pabean yang ada di Indonesia. Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar merupakan salah satu dari lima pelabuhan utama di Indonesia<sup>3</sup>. Sebagai pelabuhan utama, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menjalankan tugas pokok yaitu melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi<sup>4</sup>. Sebagai pelabuhan utama, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar sangat sibuk dan dilakukan dalam jumlah yang besar.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan, "kawasan pebean adalah kawasan dengan bata-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<sup>3</sup> M. Farid Ananda, 2012, "*Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional dalam Kasus Penyelundupan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok*", *Skripsi*, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321972-S-M.%20Farid%Ananda.pdf> (diakses 24 Februari 2016)

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 17 tentang Pengertian Pelabuhan Utama.

Keadaan ini menjadikan pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menjadi tempat di mana rawan terjadi tindak pidana kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan adalah salah satu tindak pidana yang sangat memungkinkan untuk dicegah, karena kepabeanan itu sendiri merupakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean<sup>5</sup>. Adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan. Pencegahan juga merupakan langkah yang paling baik untuk dilakukan dari keseluruhan upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan, karena pencegahan menghindarkan dari kerugian dan bahaya dari tindak pidana kepabeanan. Upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif dengan meniadakan atau mengurangi celah terhadap faktor-faktor maupun kondisi-kondisi yang memicu terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil “Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar” sebagai judul penelitian.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kepabeanan , “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan ?
2. Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan dilakukan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan;
2. untuk mengetahui pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. secara teoritis, menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam di bidang tindak pidana kepabeanan;
2. secara praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana kepabeanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencegahan Kejahatan

##### 1. Pengertian Pencegahan Kejahatan

Memberikan definisi, khususnya tentang apa yang dimaksud pencegahan kejahatan penting, agar ada arah dan batasan yang jelas dalam membahas tentang pencegahan kejahatan. Untuk itu di bawah ini akan diberikan beberapa definisi tentang pencegahan kejahatan.

*Guidelines for The Prevention of Crime* mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai<sup>6</sup> “*strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes occurring, and their potential harmful effects on individual and society, including fear of crime, by intervening to influence their multiple causes*”. *Guidelines for The Prevention of Crime* mengartikan pencegahan kejahatan sebagai upaya mencari strategi dan cara-cara untuk mengurangi potensi kejahatan dan dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat, termasuk mengurangi ketakutan individu dan masyarakat terhadap kejahatan melalui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (terjemahan bebas). Menurut definisi

---

<sup>6</sup> United Nations Office on Drug and Crime, 2010, *Handbook on the Crime Prevention Guidelines*,  
[https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Crime\\_Prevention\\_Guidelines\\_-\\_Making\\_them\\_work.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf) (diakses 19 Maret 2016)

tersebut, pencegahan kejahatan dilakukan pertama-tama dengan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan, kemudian dari faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut disusun strategi dan cara-cara untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan ini ditujukan untuk mengurangi resiko kejahatan, dampak kejahatan, dan ketakutan individu, dan masyarakat terhadap kejahatan.

Adapun *National Crime Prevention Institute* 1972<sup>7</sup> memberikan definisi pencegahan kejahatan sebagai “*the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it.*” Menurut *National Crime Prevention Institute* (1972) pencegahan kejahatan adalah antisipasi, pengenalan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan dan langkah awal dalam mengambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan (terjemahan bebas). Dari definisi tersebut, pencegahan kejahatan dilakukan dengan melakukan antisipasi, pengenalan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan itu sendiri juga langkah awal dalam pengambilan tindakan. Pencegahan kejahatan ditujukan untuk menghilangkan maupun mengurangi kejahatan.

---

<sup>7</sup> National Crime Prevention Council, 2006, *Crime Prevention Council*, <http://www.ncpc.org/training/powerpoint-trainings/crime-prevention-history-and-theory.ppt> (diakses 20 Maret 2016)

## 2. Pencegahan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal (*Criminal Policy*)

Membahas mengenai pencegahan kejahatan, terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal, karena pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan/politik kriminal adalah upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penganggulangan kejahatan.

Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”<sup>8</sup>. G. Peter Hoefnagels juga memberikan berbagai definisi tentang kebijakan kriminal, antara lain sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. *criminal policy is the science of responses;*
2. *criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *criminal policy is a policy of designation human behavior as crime;*
4. *criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Dari definisi G. Peter Hoefnagels tersebut di atas, sehubungan dengan pembahasan ini, kebijakan kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan.

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang mana kebijakan sosial memiliki tujuan yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2



(*social welfare*)<sup>10</sup>. Politik kriminal juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>11</sup>. Dari uraian tersebut ditarik kesimpulan, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang mana kebijakan sosial menggunakan salah satunya kebijakan kriminal untuk mencapai tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut G. P. Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan<sup>12</sup>:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment with mass media*).

Dengan demikian, kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan sarana penal sebagaimana disebutkan pada poin 1, dan sarana non-penal sebagaimana disebutkan pada poin nomor 2 dan 3<sup>13</sup>. Berdasarkan pendapat G. P. Hoefnagels tersebut, kebijakan kriminal ditempuh dengan sarana penal dan sarana non-penal sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 77

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, op. cit.*, hlm. 2

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>13</sup> *Ibid*.

a. Penaggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, sarana penal sifatnya represif, yaitu penegakan hukum apabila terjadi kejahatan. Sarana penal dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Adapun pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari kebijakan hukum maupun dari kebijakan kriminal, yang mana menurut Sudarto kebijakan hukum adalah<sup>14</sup> :

1. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”<sup>15</sup>. Dengan demikian kebijakan hukum pidana berarti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 25

perundang-undangan pidana yang baik<sup>16</sup>. Sedangkan menurut

A. Mulder<sup>17</sup> “*strafrechtspolitik*” atau yang diartikan politik hukum pidana ialah garis kebijakan yang menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dijalankan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, *pertama* hukum pidana khususnya peraturan perundang-undangan harus mampu tidak hanya mengakomodir kehajatan yang ada di masa kini, namun kejahatan yang akan ada di masa yang akan mendatang. Hal ini penting mengingat asas yang sangat penting dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, bahwa “tiada satu perbuatan boleh dihukum, melainkan alas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu,” Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait asas ini R. Soesilo menjelaskan<sup>18</sup> :

sekarang sudah menjadi kenyataan terang bahwa terutama dalam kalangan ekonomi dan perniagaan, jumlah kejahatan yang tidak dapat dihukum makin lama makin besar. Hal itu oleh karena hukum belum meliputi lapangan ekonomi dan perniagaan tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 25 - 26

<sup>18</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 28

Dalam penjelasan R. Soesilo ini dapat diketahui betapa pentingnya peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini di bidang pidana mampu meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Bisa jadi, ada perbuatan yang menimbulkan misalnya kerugian dan merupakan kejahatan, namun karena perundang-undangan yang ada belum mengakomodir perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana maka pelaku kejahatan tidak dapat dihukum dan akan sulit mengendalikan kejahatan tersebut apabila belum ada instrumen hukum yang mengaturnya. *Kedua*, sarana kebijakan hukum pidana selain merupakan upaya represif juga merupakan upaya preventif. Menurut Chairul Huda<sup>19</sup> :

.... ditinjau dari tujuan-tujuan prevensi, aturan hukum yang memuat rumusan tindak pidana juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk sejauh mungkin menghindari dari melakukan perbuatan tersebut, mengingat ancaman pidana yang diletakkan padanya.

*Ketiga*, penegakan hukum apabila terjadi kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana terutama oleh polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.

b. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non-Penal

Upaya penanggulangan kejahatan selanjutnya yaitu sarana non-penal yang merupakan sarana pengulangan kejahatan

---

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*" *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 16

di luar hukum pidana. Sarana non-penal sifatnya preventif yaitu sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sarana non-penal mempunyai posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan kriminal<sup>20</sup>. Karena meskipun sarana penal juga penting dalam penanggulangan kejahatan, namun sarana penal mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan sarana penal di antaranya :

1. Sulitnya hukum pidana menaggulangi kejahatan atau mencegah terjadinya kejahatan karena hukum pidana dalam bekerjanya selalu mencerminkan sifat kereprisifannya bukan sifat responsifnya<sup>21</sup>. Hukum pidana sifatnya represif karena lebih mempersoalkan bagaimana memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Juga dalam pelaksanaan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), untuk kepentingan efisiensi agar perkara cepat selesai, disebabkan banyaknya beban perkara yang harus diproses. Bahkan bisa jadi pemenuhan terhadap hak-hak

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, op. cit.*, hlm. 43

<sup>21</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 55

tersangka sebagaimana disebutkan pada Pasal 50 sampai 68 KUHAP tidak terlaksana<sup>22</sup>.

2. Apabila kurang hati-hati dalam pelaksanaannya akan menjadi bumerang seperti isu bahwa penjara merupakan tempat belajar para narapidana sehingga setelah keluar menjadi lebih canggih<sup>23</sup>.
3. Sarana penal baru bekerja setelah terjadi kejahatan, sehingga telah ada kerugian yang timbul. Hal ini masih terkait dengan sifat hukum pidana yang represif.
4. Keterbatasan sarana penal salah satunya yaitu sarana penal juga harus ditunjang dengan sarana non-penal<sup>24</sup>.

Sarana non-penal ditempuh dengan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan<sup>25</sup>. Hal ini sebagaimana dibahas dalam kongres-kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, sebagai berikut<sup>26</sup>.

Kongres ke-6 (1980)

*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime.*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56

<sup>23</sup> Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 54

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>25</sup> Barda Nawari Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulan Kejahatan*, *op. cit.*, hlm. 82

<sup>26</sup> *Ibid.*

*Basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime.*

Kongres ke-7 (1985)

*The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime.*

Deklarasi Wina Kongres ke-10 (2000)

*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policy.*

Mengenai keadaan-keadaan yang menjadi faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan di Indonesia, perlu didukung dengan hasil-hasil penelitian<sup>27</sup>. Menurut Teguh Prasetyo sumber bahan dalam kebijakan kriminal harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. masukan berbagai pertemuan ilmiah;
2. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
3. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional;
4. masukan dari konvensi internasional;
5. masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Hal tersebut penting, mengingat kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Maka hasil-hasil penelitian akan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, op. cit.*, hlm. 12.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 42



mendukung upaya dalam menyusun rencana-rencana dan strategi yang rasional dalam menganggulangi kejahatan juga mencegah kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, "*the characteristic of a rational crime policy is nothing more than the application of rational method*"<sup>29</sup>. Dalam hal ini juga diperlukan penelitian terhadap perkembangan/kecenderungan kejahatan (*crime trend*)<sup>30</sup>.

Selain mencegah terjadinya kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sarana non-penal juga menggarap "*mental health*" yaitu upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen<sup>31</sup>.

Sarana non-penal perlu untuk diintensifkan, karena sarana penal selain kekurangan dan keterbatasannya yang telah dijelaskan sebelumnya, sarana penal juga masih diragukan efektivitasnya untuk mencapai tujuan politik kriminal yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pendapat dan hasil penelitian, menyatakan sebagai berikut<sup>32</sup>.

- a. Rubbin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, loc. cit.*

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, op. cit.*, hlm. 13

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 49, 47

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 51

- atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat;
  - c. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Selain itu, penggunaan sarana non-penal secara efektif akan mengurangi beban banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, *starf* berarti dipidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* berarti perbuatan, maka *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaarfeit* merupakan istilah resmi yang digunakan pada *Strafwetboek* atau yang sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>33</sup>. Selain diterjemahkan sebagai tindak pidana, para ahli hukum pidana memberikan terjemahan yang

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

berbeda-beda terhadap istilah *strafbaarfeit*, di antaranya, *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun pelanggaran pidana yang biasanya digunakan para sarjana. Adapun penggunaan istilah-istilah tersebut oleh beberapa ahli hukum pidana terbagi sebagai berikut<sup>34</sup>.

1. Istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Effendi, Utrech;
2. Istilah “perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno;
3. Istilah “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H. J Van Schravendijk;
4. Istilah “tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo; S. R. Sianturi;
5. Istilah “delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

Istilah yang berbeda-beda tersebut tidak menjadi masalah selama istilah digunakan sesuai konteksnya dan dipahami maknanya, istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian bahkan digunakan juga istilah kejahatan<sup>35</sup>.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian tindak pidana. Pendefinisian tentang apa yang dimaksud tindak pidana penting, agar dapat diketahui kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>34</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>35</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 102

tindak pidana<sup>36</sup>. Namun sebelum memberikan definisi tentang tindak pidana, ada dua pandangan tentang tindak pidana yang perlu diketahui untuk merumuskan pengertian tindak pidana. Kedua pandangan tersebut adalah pandangan monistis dan pandangan dualistik. *Pertama*, pandangan monistis menggabungkan antara adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana<sup>37</sup>. *Kedua*, pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* tidak mencakup unsur tindak pidana<sup>38</sup>. Pandangan dualistik tidak mempersyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan itu (perbuatan pidana/*criminal act*)<sup>39</sup>.

Simons adalah ahli hukum pidana yang memiliki pandangan monistis<sup>40</sup>. Simons memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut<sup>41</sup>.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 105

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur berikut dipenuhi<sup>42</sup> :

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan tersebut diancam dengan pidana;
3. bersifat melawan hukum;
4. adanya unsur kesalahan; dan
5. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Chairul Huda, adalah ahli hukum pidana yang memiliki pandangan dualistik. Menurutny, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai fungsi yang berbeda<sup>43</sup>. Ketentuan mengenai tindak pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana<sup>44</sup>. Sedangkan pertanggungjawaban pidana berfungsi menentukan syarat-syarat apa yang harus ada pada diri seseorang untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatannya<sup>45</sup>. Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bukan hanya kepada pelaku kejahatan dengan merumuskan perbuatan mana saja yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Chairul Huda, *op. cit.*, hlm. 16

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 17

termasuk tindak pidana<sup>46</sup>. Pandangan monistis yang menggabungkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seolah memberikan pemahaman bahwa rumusan mengenai tindak pidana dan ancaman pidana hanya ditujukan kepada mereka yang terlanjur melakukan kejahatan, padahal menurut Chairul Huda, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan, hal ini dimaksudkan bahwa ancaman pidana bukan hanya berlaku kepada mereka yang terlanjur melakukan kejahatan, tapi juga ditujukan kepada seluruh masyarakat.

Padangan dualistik ini dianut dalam Rancangan KUHP pada bagian penjelasan Pasal 15 yang memisahkan tindak pidana dan syarat-syarat pembedaan<sup>47</sup>.

Dari pendapat Chairul Huda tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan ada unsur kesalahan. Suatu perbuatan tidak perlu mensyaratkan adanya kemampuan bertanggungjawab dari pembuatnya untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>47</sup> *Ibid.*

## **C. Kepabeanan**

### **1. Pengertian Kepabeanan**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

### **2. Fungsi Kepabeanan**

Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai sumber pendapatan negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut<sup>48</sup>.

#### **a. Fungsi Sebagai Sumber Pendapatan Negara**

Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor. Hal ini yang membedakan fungsi pabean di negara maju dan negara berkembang. Di negara berkembang fungsi sumber pendapatan negara ini masih sangat dominan, sedangkan di negara maju fungsi fasilitas perdagangan lebih

---

<sup>48</sup> Basuki Suryanto, "Fungsi Kepabeanan", Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008. <http://www.bppk.depkeu.go.id/webbbc/images/stories/file/2011/artikel/FUNGSI-KEPABEANAN.pdf>, hlm. 1 - 4 (diakses 26 Februari 2016)



dominan<sup>49</sup>. Namun seiring semakin majunya aktivitas perdagangan internasional dengan adanya *free trade*, di mana tarif-tarif dalam ekspor impor dianggap sebagai hal yang merintangi perdagangan internasional berusaha dihilangkan, maka fungsi utama kepabeanan sebagai sumber pendapatan negara di negara berkembang, terutama negara-negara berkembang yang aktif mengikuti perjanjian-perjanjian *free trade*, mulai bergeser ke fungsi fasilitas perdagangan sebagai fungsi paling utama kepabeanan.

b. Fungsi Sebagai Fasilitas Perdagangan

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Lebih jelasnya fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” UU Kepabeanan poin c sebagai berikut :

.... untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia ....

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan juga dapat dilihat dari Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bagian Umum poin nomor 5 sebagai berikut.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

- a. pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
- b. penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer);
- c. pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan;
- d. peran serta anggota masyarakat untuk bertanggungjawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (*self assessment*), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkoba, uang palsu, dan senjata api.

c. Fungsi Perlindungan

1) Fungsi Perlindungan dengan Penarikan Bea Masuk dan Bea Keluar

Fungsi perlindungan dilakukan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar. Dalam hal ini, penarikan bea masuk dan bea keluar dimaksudkan untuk, sebagai berikut.

- a) Melindungi kepentingan nasional dengan pengenaan bea keluar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2A UU Kepabeanan sebagai berikut.

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
- (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk :
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

- b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
- c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
- d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.

b) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk antidumping<sup>50</sup>, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A dan 23C UU Kepabeanan, sebagai berikut :

#### Pasal 18

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
  3. menghalangi pengembangan industri sejenis dalam negeri.

#### Pasal 23A

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal

---

<sup>50</sup> Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, yang mana pengimpor menjual barang dengan harga yang lebih murah di negara ekspor daripada di negaranya sendiri, salah satu tujuan dumping adalah untuk menguasai pasar di suatu negara. Maka untuk mengatasi dumping, dikenakan bea masuk antidumping.

terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

#### Pasal 23C

- (1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
- (2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

(Pasal 12 ayat (1) : Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.)

- 2) Fungsi Perlindungan Melalui Pembatasan dan Larangan Ekspor Impor, Pengagguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Intelektual, dan Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Pembatasan dan larangan ekspor dan impor merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat

yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU  
Kepabeanan menyatakan sebagai berikut.

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Peraturan menteri yang dimaksud pada ketentuan tersebut di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK. 04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Permenkeu tentang Pengawasan Barang Lintas). Permenkeu tentang Pengawasan Barang Lintas Pasal 2 ayat (1), (2), dan (6) menjelaskan sebagai berikut.

- (1) Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan yang dimaksud kepada menteri u.p. Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Portal National Single Window sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, masing-masing instansi teknis mengeluarkan peraturan mengenai barang yang dilarang dan/atau dibatasi atas impor atau ekspornya atau yang disebut barang lartas. Instansi-instansi tersebut di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan lain-lain. Peraturan yang dikeluarkan masing-masing instansi teknis ini kemudian disampaikan kepada Menteri, kemudian barang yang ditetapkan dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (barang lartas) akan dicantumkan pada portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan alamat [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id).

Adapun menurut Adrian Sutedi<sup>51</sup> barang yang perlu dicegah masuk maupun keluar Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8 – 9

penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.

- b. Barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri.
- c. Barang-barang cetak, audio atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- d. Bahan dan barang-barang narkotika dan psikotropika yang dapat membahayakan, merusak mental, kehidupan, dan orientasi masyarakat pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
- e. Bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- f. Bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup yang sehat.

- g. Flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam.
- h. Benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- i. Bahan atau barang-barang yang yang tidak sesuai dengan kebijakan melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Sedangkan perlindungan melalui pengagguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual diatur pada pasal 54 sampai 64 UU Kepabeanan, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara diatur pada pasal 64A UU Kepabeanan.

### **3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pelaksana Tugas Pokok di Bidang Kepabeanan**

Pelaksanaan fungsi kepabeanan tersebut di atas, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku pelaksana tugas pokok di bidang kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu organisasi dari Kementerian Keuangan (berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres tentang Kementerian Keuangan)



yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 Perpres tentang Kementerian Keuangan).

Dalam melaksanakan tugas DJBC sebagaimana disebutkan di atas, DJBC melaksanakan fungsi (Pasal 21 Perpres tentang Kementerian Keuangan) :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi DJBC adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka dunia<sup>52</sup>. Langkah spesifik untuk mencapai visi DJBC yaitu melalui misi DJBC sebagai berikut<sup>53</sup> :

- a. memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
- c. mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Selain fungsi DJBC tersebut di atas, dalam halaman resmi DJBC sebagai kelanjutan dari visi dan misi DJBC tersebut di atas, DJBC mempunyai fungsi sebagai berikut<sup>54</sup> :

- a. meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;

---

<sup>52</sup> Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011, *Visi, Misi, Strategi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> (diakses 14 Maret 2016)

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

- b. mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. melindungi masyarakat industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelejen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan keseimbangan; dan
- f. mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

#### 4. Undang-Undang yang Mengatur tentang Kepabeanan di Indonesia

##### a. Undang-Undang yang Ada Sebelum Indonesia Merdeka

Sebelum merdeka, ada tiga undang-undang yang mengatur tentang Kepabeanan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka undang-undang ini masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen bahwa "*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang Dasar ini.*" Di bawah ini, tiga undang-undang yang dimaksud.

- 1) *Indische Tarief Staatblad* Tahun 1873 Nomor 35.
- 2) *Rechten Ordonantie Staatblad* Tahun 1882 Nomor 240

Yang dimaksud *Rechten Ordonantie* adalah Undang-Undang Bea (UU Bea)<sup>55</sup>. Undang-Undang Bea ini mengatur antara lain tentang peraturan-peraturan tentang tempat-tempat di mana harus dipenuhi kewajiban ekspor impor, kewenangan pegawai (dalam UU Bea tidak disebutkan secara jelas pegawai apa yang dimaksud) untuk melakukan penyidikan, dokumen-dokumen yang harus dibuat, dan ketentuan pidana. Namun pada UU Bea

---

<sup>55</sup> R. Wiyono, 1975, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 5 ke hlm. 150

tidak mencantumkan pidana penjara seperti pada undang-undang masa kini yang selalu mencantumkan pidana penjara dan maksimal minimal lamanya pidana penjara.

Pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* adalah salah satu tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi atau UU TPE). Pada perubahan kedua UU TPE yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 156 Tahun 1958) ditambahkan pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* sebagai salah satu tindak pidana ekonomi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat ketentuan-ketentuan UU TPE terutama pada poin h di bawah ini.

#### Pasal 1

Yang disebut tindak pidana ekonomi ialah :

1. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan :
  - a. *Ordonantie Gecontroleerder Goedaren* 1948 (*Staatblad* Nomor 144 Tahun 1948) sebagaimana diubah dan ditambah dengan *Staatblad* Nomor 160 Tahun 1949;
  - b. *Prijsbeheersing-ordonantie* 1948 (*Staatblad* Nomor 295 Tahun 1948);
  - c. Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang 1951 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1933);
  - d. *Rijsordonantie* 1948 (*Staatblad* Nomor 253 Tahun 1948);

- e. Undang-Undang Darurat tentang Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1952);
- f. *Deviezen Ordonantie* 1940 (*Staatblad* Nomor 205 Tahun 1940).

Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1958) telah ditambahkan pada daftar sebagai tindak pidana ekonomi peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>56</sup>.

- g. *Crisis –uitvoerordonantie* 1939 (*Staatblad* No. 658 tahun 1939) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah;
- h. *Rechtendordonantie* (*Staatblad* Nomor 240 tahun 1882 Nomor 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah;
- i. *Indische Scheepvaartwet* (*Staatblad* Nomor 70 Tahun 1936) dan *Scheepvaartverordening* 1936 (*Staatblad* Nomor 703 Tahun 1936) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* dengan sendirinya menjadi delik ekonomi, akibat yuridisnya, semua sanksi pidana dalam *Rechten Ordonantie* menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ada dalam UU TPE<sup>57</sup>.

### 3) *Tarief Ordonantie Staatblad* Tahun 1910 Nomor 682

---

<sup>56</sup> R. Wiyono, *op. cit.*, hlm.5

<sup>57</sup> A. Hamzah, 1998, *Delik Penyelundupan, Disesuaikan dengan INPRES No. 4 Tahun 1958*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 15-16

b. Undang-Undang yang ada setelah Indonesia Merdeka

1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah suatu bentuk pembaharuan di bidang peraturan kepabeanan, bagaimana tidak 50 (lima puluh) tahun setelah Indonesia merdeka berulah Indonesia memiliki undang-undang kepabeanannya sendiri. Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, produk hukum tentang kepabeanan di Indonesia hanyalah perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan terhadap undang-undang peninggalan kolonial. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor RI 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, peraturan peninggalan zaman kolonial tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan pada Ketentuan Penutup Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengakomodir kepentingan perdagangan internasional yang semakin berkembang serta adanya penyesuaian-penyesuaian terkait dengan aturan-aturan internasional yang ada misalnya ketentuan

tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan sebelumnya di atas. Hal baru dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang tidak ada pada peraturan yang ada sebelumnya adalah adanya aturan mengenai pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding<sup>58</sup>.

- 2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Sebelas tahun setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diadakan lagi pembaharuan terhadap undang-undang ini dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan kondisi masa kini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 masih tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>58</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



2006 adalah bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam bentuk pengubahan, penambahan, dan penghapusan pasal untuk mengakomodir perkembangan kegiatan kepabeanan masa kini dan memperjelas ketentuan yang kurang jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Oleh karena itu, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 masih merupakan satu kesatuan.

Adapun yang menjadi perbaikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 di antaranya :

1. ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang disebut delik penyelundupan yang hanya menyatakan “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan....”. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut diubah agar lebih jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana penyelundupan dan dibagi atas penyelundupan di bidang impor yang diatur pada

Pasal 102 dan ditambahkan Pasal 102A tentang penyelundupan di bidang ekspor;

2. bab yang baru ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan tidak ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah tentang Pembinaan Pegawai. Pembinaan pegawai ini mengatur tentang kode etik pegawai dan komisi kode etik, adanya sanksi bagi pegawai yang tidak teliti, pemeriksaan internal dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanaan yang menyangkut pegawai DJBC, penghargaan bagi pegawai dan orang lain yang berjasa menangani pelanggaran kepabeanaan.

#### **D. Tindak Pidana Kepabeanaan**

##### **1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanaan**

Secara yuridis, tindak pidana kepabeanaan adalah segala perbuatan yang dalam UU Kepabeanaan diancam dengan sanksi pidana. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102), yaitu :
  - 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;

- 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
  - 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
  - 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
  - 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
  - 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan;
  - 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
  - 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A), yaitu :
- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
  - 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
  - 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
  - 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut. (Pasal 102D)
  - d. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. (Pasal 103 poin a)
  - e. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. (Pasal 103 poin b)
  - f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. (Pasal 103 poin c)

- g. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin d)
- h. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. (Pasal 103A ayat (1))
- i. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana. (Pasal 104 poin a)
- j. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan. (Pasal 104 poin b)
- k. Menghilangkan, meyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan. (Pasal 104 poin c)
- l. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan. (Pasal 104 poin d)
- m. Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai. (Pasal 105)

Perbuatan-perbuatan tersebut, dikelompokkan sebagai berikut<sup>59</sup>.

a. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.

b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi

Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyimpangan (dari peraturan)<sup>60</sup>. Deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan<sup>61</sup>.

Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya. Dalam manifes<sup>62</sup> dimuat salah satunya pelabuhan tujuan, apabila barang dibongkar atau diturunkan bukan di pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam manifes

---

<sup>59</sup> Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 190 - 195

<sup>60</sup> <http://www.kbbi.web.id/deviasi>

<sup>61</sup> Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 190.

<sup>62</sup> Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan. (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifes>)

maka dikenakan sanksi pidana. Apabila penyimpangan tidak dimaksudkan oleh pelaku, atau di luar kemampuannya misalnya kerusakan mesin, cuaca, pembajakan, dan pelaku dapat membuktikannya maka tidak dikenakan sanksi pidana.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa<sup>63</sup> :

- (a) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti *Bill of Lading* atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;
- (b) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean

Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan. Yang dimaksud dengan mengakses yaitu “tindakan atau upaya yang dilakukan untuk *login* atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabeanan, sehingga orang tersebut dapat mengirim

---

<sup>63</sup> Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 192.

informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik”<sup>64</sup>.

Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

e. Membantu Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan atau orang pribadi sendiri<sup>65</sup>. Mambantu melakukan tindak pidana juga diatur dalam KUHP, Pasal 56 sebagai berikut.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut R. Soesilo<sup>66</sup> membantu melakukan (*medeplichtig*)

ialah :

.... jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan kesempatan, daya upaya, keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>66</sup> R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 75-76



bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Tindak pidana perusakan segel pabean termasuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 UU Kepabeanan. Segel adalah salah satu sarana bagi pejabat bea dan cukai di bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana penyelundupan, segel dipasang pada barang ekspor atau impor terutama yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya<sup>67</sup>. Segel dipasang karena pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang tersebut. Barang yang disegel tersebut baru dapat dibuka segelnya apabila kewajiban pabeannya sudah terpenuhi atau segel dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, segel tidak boleh dibuka tanpa izin pejabat bea dan cukai<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 195

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 366.

## **2. Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan**

Undang-Undang Kepabeanan juga memuat tentang pemberatan sanksi pidana, dalam keadaan-keadaan sebagai berikut.

- a. Mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102 B UU Kepabeanan)

Yang dimaksud Pasal 102B ini adalah tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. Pada tindak pidana penyelundupan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan apabila tindak pidana penyelundupan yang dilakukan mengakibatkan terganggunya perekonomian negara, maka sanksi pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada bagian penjelasan UU Kepabeanan tidak dijelaskan mengenai arti “terganggunya perekonomian negara” maupun

arti “perekonomian negara”. Adapun pengertian perekonomian negara dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perekonomian negara. Penjelasan Umum UU Tipikor memberikan definisi tentang perekonomian negara sebagai berikut.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- b. Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102C UU Kepabeanan)

Yang dimaksud Pasal 102C ini adalah tindak pidana penyelundupan (Pasal 102 dan Pasal 102 A) maupun tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102B) apabila dilakukan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum, maka sanksi pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Lebih jelasnya, apabila tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka sanksi pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari sanksi yang dijatuhkan.

- c. Tidak terpenuhinya pungutan negara (Pasal 103A ayat (2) UU Kepabeanan)

Pasal 103A ayat (2) merupakan kelanjutan dari Pasal 103 ayat (1). Pasal 103A ayat (1) adalah tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean. Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, maka sanksi pidana diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua tahun) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **3. Subjek Tindak Pidana Kepabeanan**

Pada ketentuan-ketentuan pidana UU Kepabeanan menyebutkan “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana. Adapun yang dimaksud orang menurut Pasal 1 angka 12 UU Kepabeanan adalah “*orang perseorangan atau badan hukum*”. Maka pelaku tindak pidana kepabeanan yaitu orang perseorangan

atau manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*).

a. Orang Perseorangan atau Manusia

Manusia sebagai pelaku tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro<sup>69</sup> memberikan uraian sebagai berikut.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, yang juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa KUHP menekankan adanya kemampuan daya pikir sebagai syarat dibebankannya pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat (1) KUHP di bawah ini.

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Selain itu, berdasarkan pendapat di atas, KUHP juga menganut ajaran bahwa subjek tindak pidana adalah manusia, dapat dilihat dari jenis hukuman-hukuman pokok dalam KUHP yang diatur pada Pasal 10 sebagai berikut.

Hukuman-hukuman ialah:

a. Hukuman-hukuman pokok:

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 59

- 1e. hukuman mati,
- 2e. hukuman penjara,
- 3e. hukuman kurungan'
- 4e. hukuman denda.
- b. Hukuman-hukuman tambahan :
  - 1e. pencabutan beberapa hak tertentu,
  - 2e. perampasan barang tertentu,
  - 3e. pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*)<sup>70</sup>.

b. Badan Hukum atau Korporasi

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia bukan lagi merupakan satu-satunya subjek hukum pidana. Selain manusia, korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Hal ini telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus) tentang korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana selain manusia. Begitupun UU Kepabeanan telah menerima korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Kepabeanan juga mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diatur pada Pasal 108 sebagai berikut.

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, atau

---

<sup>70</sup> Tongat, *op. cit.*, hlm. 131

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

*Pertama*, yang dimaksud korporasi dalam UU Kepabeanan yaitu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi. *Kedua*, apabila korporasi diduga melakukan tindak pidana, maka yang dituntut

dan dikenai sanksi pidana adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurus korporasi, yaitu mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. *Ketiga*, termasuk tindak pidana korporasi, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang dalam korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi. *Keempat*, apabila korporasi dituntut melakukan tindak pidana maka korporasi diwakili oleh pengurusnya yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan. *Kelima*, apabila korporasi dipidana, pidana pokok terhadap korporasi adalah pidana denda.

c. Pengusaha maupun Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan

Pengusaha maupun perusahaan pengurus jasa kepabeanaan juga adalah salah satu subjek tindak pidana kepabeanaan yang diatur dengan pasal tersendiri yaitu Pasal 107 UU Kepabeanaan. Pada UU Kepabeanaan istilah yang digunakan adalah “pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan”, namun Ali Purwito menggunakan istilah “perusahaan



pengurusan jasa kepabeanan”<sup>71</sup>. Pendapat Ali Purwito ini sesuai dengan perkembangan masa kini bahwa pengurus jasa kepabeanan bukan hanya perseorangan yaitu pengusaha tapi kebanyakan pengurus jasa kepabeanan adalah perusahaan.

Pasal 107 UU Kepabeanan mengatur sebagai berikut.

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Jika pengusaha atau perusahaan pengurus jasa kepabeanan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada UU Kepabeanan, maka ketentuan pidana pada UU Kepabeanan juga berlaku terhadapnya. Misalnya, pengusaha atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan memalsukan *invoice* yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah dari nilai pabeannya. *Invoice* adalah dokumen perdagangan yang sering juga disebut faktur<sup>72</sup>. Sedangkan nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Pemalsuan *invoice* ini dimaksudkan untuk mengurangi besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh importir.

---

<sup>71</sup> Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 196.

<sup>72</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 49.

#### **4. Tindak Pidana Kepabeanan sebagai Tindak Pidana Ekonomi**

Tindak pidana kepabeanan adalah salah satu tindak pidana ekonomi. Sebelum menjelaskan tindak pidana kepabeanan sebagai tindak pidana ekonomi, terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa yang dimaksud tindak pidana ekonomi.

Secara yuridis, pengertian tindak pidana ekonomi terbagi dua, yaitu tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dan tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Secara sempit, tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU TPE. Sedangkan secara luas, tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU TPE dan semua tindak pidana di luar UU TPE yang bercorak atau bermotif ekonomi atau memberikan dampak negatif terhadap sistem perekonomian dan keuangan negara yang sehat<sup>73</sup>.

B. Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan dan serta mempunyai sanksi pidana<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Hariman Satria, 2014, *Anantomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 139

<sup>74</sup> Edi Sutedi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33

Ada dua istilah dalam tindak pidana ekonomi yang perlu dibedakan yaitu istilah *economic crime* dan *economic criminality*, sebagai berikut<sup>75</sup>.

Istilah *economic crime* berbeda dengan istilah *economic criminality*. Istilah *economic crime* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan istilah *economic criminality* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan, atau penipuan.

Berdasarkan dua istilah tersebut di atas, tindak pidana kepabeanan termasuk dalam istilah *economic crime*. Lebih lanjut dijelaskan tentang *economic crime* sebagai berikut<sup>76</sup>.

Ciri penting dari *economic crime* ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ekonomi adalah sebagai berikut<sup>77</sup> :

1. perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
2. perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
3. perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Clarke mengemukakan karakteristik tindak pidana ekonomi yang lebih rinci dan lebih mendalam sebagai berikut<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 34

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm 37

- (1) *Privacy*
- (2) *Lack of Public Order Violation*
- (3) *Internal Detection and Control*
- (4) *The Limited Role of Law*
- (5) *The Ambiguity of Business Crime*
- (6) *Business Offences as Politics*
- (7) *Sanctions*
- (8) *Consumerism and Business Accountability*
- (9) *Private Interest versus Public Good*

Pendapat Clarke tersebut di atas kemudia diberi penjelasan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut<sup>79</sup> :

1. *Privacy*

Karakteristik ini didasarkan pada individualisme dan liberalisme yang merupakan ciri dari negara maju seperti Amerika Serikat. Individualisme dan liberalisme mengakibatkan sulitnya para pengusaha untuk disentuh oleh hukum karena mereka memiliki kekebalan hukum. Kekebalan hukum berasal dari hak pribadi (*the right to privacy*) yang dimiliki oleh setiap individu dalam Masyarakat Barat.

2. *Lack of Public Order Violation*

Dengan adanya hak pribadi (*the right to privacy*), maka sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di dunia usaha sebagai pelanggaran yang bersifat publik (*lack of public order violation*). Juga hubungan-hubungan ekonomi dilakukan secara privat oleh para pelaku usaha, maka sulit menemukan sifat publiknya.

---

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 60

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 61-64

### 3. *Internal Detection and Control*

Dalam perusahaan terdapat dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan direktur-direktornya. Ketika terjadi pelanggaran dalam dunia usaha, dewan komisaris sudah tentu mengetahui hal tersebut (*internal detection*). Terhadap pelanggaran yang terjadi, dewan komisaris akan “membenarkan” perbuatan para direktur-direktornya.

### 4. *Limited Role of Law*

Dari penjelasan pada poin ketiga di atas, tampak bahwa dalam tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau direktur perusahaan peranan hukum (*the role of law*) sangat terbatas ataupun lemah.

### 5. *The Ambiguity of Business Crime*

Romli Atmasasmita tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud *The Ambiguity of Business Crime*.

### 6. *Business Offences as Politics*

Tindak pidana ekonomi terkadang juga berlatar belakang politik atau memiliki kaitan dengan dunia politik. Salah satu contohnya adalah kasus Bank Duta yang mana pada masa itu yang mana sebagian besar saham Bank Duta dikuasai tiga yayasan yang semuanya milik Presiden Soeharto. Selain Bank Duta ada juga kasus Bank Century.

## 7. *Sanctions*

Salah satu hal yang menjadi permasalahan tindak pidana ekonomi adalah pemberian sanksi sesuai dampak yang ditimbulkan tindak pidana ekonomi. Sebagai contoh di Inggris, terhadap tindak pidana ekonomi terkait pajak, sanksi yang dipandang efektif adalah penilaian kembali pada aset perusahaan dan penambahan beban bunga pada pajak terhutang. Sedangkan penyelesaian dengan sanksi pidana tidak efektif.

## 8. *Consumerism and Business Accountability dan Private Interest Versus the Public Good*

Karakteristik kedelapan dan kesembilan Clarke digabungkan pembahasannya karena kedua karakteristik ini sama-sama dititikberatkan pada masalah standarisasi kualitas hasil produksi yang terkait dengan perlindungan konsumen, antara etika usaha dan kepentingan memperoleh keuntungan.

Selain sembilan karakteristik tindak pidana ekonomi yang dikemukakan Clarke tersebut di atas, Romli Atmasasmita menambahkan kolusi (*collusion*) sebagai karakteristik menonjol dari tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini, kolusi berupa kerjasama timbal balik antara aparat birokrasi dengan aktor ekonomi.

Setelah pembahasan tentang tindak pidana ekonomi tersebut di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai tindak pidana kepabeanan sebagai tindak pidana ekonomi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara luas, tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU TPE dan semua tindak pidana di luar UU TPE yang bercorak atau bermotif ekonomi atau memberikan dampak negatif terhadap sistem perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Tindak pidana kepabeanan merupakan salah tindak pidana di luar UU TPE yang bermotif ekonomi. Motif ekonomi UU Kepabeanan salah satunya telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah fungsi kepabeanan adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri. Industri merupakan indikator yang penting dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan adalah penyelundupan, penyelundupan memiliki dampak negatif terhadap bidang ekonomi khususnya industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian dampak negatif penyelundupan terhadap industri dalam negeri adalah sebagai berikut<sup>80</sup>.

1. Sinyal bagi investor akan buruknya kepastian hukum dan kepastian usaha di Indonesia, sehingga melemahkan minat investor ke dalam negeri.

---

<sup>80</sup> Wangke, Humphrey (ed), 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 45

2. Hilangnya potensi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan bea masuk.
3. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan produsen dalam negeri, karena barang-barang selundupan tidak dikenai pajak dan mempunyai standar buruk sehingga harganya tidak wajar.
4. Konsumen dalam negeri dapat dirugikan karena konsumsi barang-barang yang tidak mempunyai standar mutu yang aman dan garansi yang dipercaya.
5. Penyelundupan bahan baku ke luar negeri dapat menyebabkan berhentinya operasi industri.
6. Kerusakan alam karena penebangan/penambangan yang tidak terkendali.
7. Dalam skala besar, penyelundupan dapat mematikan industri dalam negeri dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional seperti munculnya pengangguran, kriminalitas, dll.

Dampak penyelundupan terhadap industri dalam negeri adalah penyelundupan dapat melemahkan bahkan mematikan industri dalam negeri. Dengan melemahnya industri dalam negeri tentu saja pertumbuhan ekonomi akan melambat, matinya industri akan memicu pengangguran, dan masalah pengangguran akan meningkatkan kriminalitas.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Sesuai judul penelitian ini, maka penelitian akan dilakukan di :

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar, di mana Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar di bawah wilayah kerjanya; dan
2. Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang sekaligus menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kegiatan meneliti di lokasi penelitian.
2. data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia baik itu dari buku, internet, jurnal, hasil-hasil penelitian terkait topik serupa sebelumnya, dan lain-lain.

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pertama-tama dikumpulkan terlebih dahulu data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian berdasar pada data

sekunder yang telah diperoleh kemudian dilakukan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data primer dengan :

1. wawancara, yaitu tanya jawab dengan informan yang relevan khususnya pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar;
2. observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar terkait prosedur keluar masuknya barang-barang di sana.

#### **D. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi. Selanjutnya, dari hasil analisis data akan dideskripsikan jawaban dari permasalahan yang teliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan termasuk modus operandi tindak pidana kepabeanan penting untuk diketahui dalam upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan. Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pada Tinjauan Pustaka lebih jelasnya pada bagian Pencegahan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal (*Criminal Policy*), bahwa penanggulangan kejahatan termasuk di dalamnya pencegahan kejahatan dilakukan dengan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menjadi faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan perlu didukung dengan hasil-hasil penelitian, juga diperlukan penelitian terhadap perkembangan/kecenderungan kejahatan (*crime trend*).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pembahasan tentang penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan sepenuhnya menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, putusan-putusan pengadilan, dan berita-berita yang

memiliki kaitan dengan tindak pidana kepabeanan dan dapat menjadi bahan pendukung penelitian ini.

Berikut ini adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu, putusan-putusan pengadilan, dan berita-berita terkait tindak pidana kepabeanan, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan dan modus operandi tindak pidana kepabeanan.

#### 1. Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu

- a. Hasil penelitian Venty Eka Satya<sup>81</sup> yang berjudul Penyelundupan Barang di Indonesia dan Dampaknya Secara Ekonomi

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali pada tahun 2011. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyelundupan adalah :

- 1) barang hasil penyelundupan merupakan solusi dari keterbatasan daya beli masyarakat, karena harga barang hasil penyelundupan relatif lebih rendah dan terjangkau;
- 2) keadaan geografis Indonesia yang dengan wilayah perairan yang luas, banyaknya jumlah pulau utamanya

---

<sup>81</sup> Venty Eka Satya, *op. cit.*, hlm. 27 - 43

puau-pulau kecil, juga garis pantai yang panjang menyulitkan dalam hal pengawasannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, daerah yang paling rawan terjadi tindak pidana penyelundupan adalah wilayah perbatasan (dalam penelitian ini Provinsi Riau). Hal ini disebabkan :

- 1) pemerintah yang terlalu fokus pada pengawasan wilayah perbatasan, sedangkan pembangunan di sektor ekonomi menjadi terpinggirkan. Penduduk di wilayah perbatasan lebih memilih barang yang berasal dari negara tetangga yang relatif lebih mudah didapatkan sekaligus dengan harganya yang lebih terjangkau. Tertinggalnya sektor ekonomi wilayah perbatasan juga mendorong masyarakat di wilayah perbatasan melakukan kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu menyelundupkan hasil bumi keluar Indonesia seperti kayu, ikan, pasir, dan BBM;
- 2) faktor sejarah juga dianggap memengaruhi aktifitas penyelundupan di wilayah perbatasan. Di masa lalu, sebelum adanya aturan mengenai perdagangan lintas batas negara, perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia memang banyak dilakukan dengan pedagang dari Singapura dan Malaysia.

Meskipun wilayah perbatasan menjadi tempat di mana rawan terjadi penyelundupan, namun temuan kasus penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan jauh lebih banyak daripada di Kepulauan Riau.

Penelitian ini juga memuat hasil penelitian dari Chatib Basri pada tahun 2001 bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) bahwa ada tiga faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan yaitu kegagalan sistem Bea dan Cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintahan yang menuntun adanya kesenjangan harga produk dalam negeri dan luar negeri.

Adapun untuk penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), kasus penyelundupan paling banyak ditemukan di Bandara Ngurah Rai Bali. Hal ini terjadi Bandara Ngurah Rai Bali adalah Bandara Internasional dengan arus penumpang yang tinggi utamanya dari luar negeri yang ditunjang dengan pengawasan yang ketat serta peralatan yang lengkap dan canggih. Sedangkan untuk pintu-pintu masuk pelabuhan sulit diawasi karena banyaknya pelabuhan baik yang resmi maupun yang tidak resmi sedangkan jumlah aparat terbatas.

- b. Hasil penelitian M. Farid Ananda<sup>82</sup> yang berjudul Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional dalam Kasus Penyelundupan Barang Di Pelabuhan Tanjung Priok

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Pelabuhan Tanjung Priok, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Hasil penelitian ini menemukan adanya indikasi kolusi dan adanya upaya-upaya suap dari importir yang bermasalah terhadap petugas Bea Cukai.

Dalam hal pengawasan lalu lintas barang di Pelabuhan Tanjung Priok, pengawasan dilakukan dengan sistem penjaluran yang terbagi atas jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah, serta adanya jalur MITA Prioritas dan Jalur MITA Non Prioritas (jalur MITA Prioritas dan Jalur MITA Non Prioritas hanya ada di Pelabuhan Tanjung Priok) yang merupakan manajemen resiko terhadap lalu lintas barang dengan melihat potensi bahaya dari barang yang keluar maupun masuk pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu pengawasan lalu lintas barang pada pelabuhan Tanjung Priok dibantu dengan *Gamma Ray, Hi-Co Scan Double, dan X-Ray Inspection System*.

---

<sup>82</sup> M. Farid Ananda, *op. cit.*

- c. Hasil penelitian Muhammad Syaiful K<sup>83</sup> yang berjudul Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada oknum-oknum polisi yang menyelesaikan perkara dengan cara “atur damai”. Selain itu penyelundupan di Pare-Pare masih sulit diberantas karena para pelaku umumnya pengusaha bermodal besar.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor timbulnya tindak pidana penyelundupan barang yaitu kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan garis pantai yang sangat panjang, kondisi masyarakat Indonesia yang menginginkan barang dengan kualitas dan mutu yang bagus dengan harga murah yang bisa didapatkan dengan membeli barang bekas, juga kondisi industri dalam negeri yang mana produknya belum dapat diandalkan, yang turut mempengaruhi timbulnya tindak pidana penyelundupan.

---

<sup>83</sup> Muhammad Syaiful K, 2013, “Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)”, *Skripsi*, Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7105/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUH.SYAIFUL.K.pdf?sequence=1> (diakses 24 Februari 2016)



- d. Hasil penelitian Dewiyanti Ratnasari<sup>84</sup> yang berjudul Pengawasan Pelaksanaan Lalu Lintas Barang pada daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang menjadi faktor penghambat pengawasan lalu lintas barang di Kantor Bea Cukai Makassar adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia di Kantor Bea Cukai Makassar dan juga luasnya wilayah yang berada di bawah pengawasan Kantor Bea Cukai Makassar yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kotamadya.

2. Putusan-Putusan Tindak Pidana Kepabeanan dari Mahkamah Agung RI Pasca Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

- a. Putusan No. 1179 K/Pid.Sus/2014

Pada putusan ini, terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (Pasal 102A huruf (a)). Barang yang diekspor berupa kayu Teki/Bakau yang berasal dari Pulau Tanjung Pelanduk dan Pulau Pasai,

---

<sup>84</sup> Dewiyanti Ratnasari, 2014, "*Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar*", *Skripsi*, Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 43-66, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9881/DEWIYANTI%20RATNASARI-B11110032.pdf?sequence=1>. (diakses 25 Februari 2016)

Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, diangkut menuju Batu Pahat, Malaysia. Pelaku tertangkap di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau oleh Tim Patroli Bea Cukai.

b. Putusan No. 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL

Pada putusan ini, terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest (Pasal 102 huruf (a)). Barang yang diimpor berupa barang bekas (pakaian, tas, boneka, sepatu, dll) dari Dili, Timor Leste dengan tujuan Desa Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelaku tertangkap di Boja sekitar Pulau Kapetan oleh Kapal Patroli Bea Cukai.

c. Putusan No. 119/Pid.Sus/2012/PTR

Pada putusan ini terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Pasal 102 huruf (a) dan (b)). Barang yang diimpor berupa barang bekas (karpet bekas, tilam bekas, ban mobil bekas, dan pakaian bekas) dari Pelabuhan Asa Niaga Klang Malaysia, tiba di Pelabuhan Panglong Arang Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai

Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau dan melakukan pembongkaran barang di pelabuhan tersebut. Pelaku tertangkap saat sedang melakukan pembongkaran oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Satuan Polisi Air Polres Dumai yang sedang berpatroli.

d. Putusan No. 270/Pid.Sus/2011/PTR

Pada putusan ini terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor yaitu mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (Pasal 102A huruf (e)). Barang yang ekspor berupa kayu teki/bakau dari Pulau Geranting Kodya Batam Provinsi Riau menuju ke Jurong Port Singapura. Pelaku tertangkap di perairan Takong Kodya Batam Kepulauan Riau oleh Petugas Bea Cukai yang sedang melakukan patroli.

e. Putusan No. 580 K/Pid.Sus/2011

Pada putusan ini terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara (Pasal 102 huruf (f)). Pelaku mengeluarkan

barang dari kawasan berikat untuk dikirim ke kawasan berikat lainnya. Dari keseluruhan barang yang dikirim hanya kurang dari seperduanya memiliki dokumen pabean, sisanya belum memiliki dokumen pabean. Pelaku mengaku bahwa seluruh barang yang akan diangkut telah tercantum dalam dokumen pabean, namun pada saat pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai ditemukan bahwa ada barang yang belum dilindungi dokumen kepabeanan yang dikeluarkan dari kawasan berikat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

f. Putusan No. 96 K/Pid.Sus/2010

Pada putusan ini terjadi tindak pidana berupa penyelundupan di bidang impor yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan (Pasal 102 huruf (f) UU Kepabeanan). Barang yang diimpor berupa gula tebu asal Malaysia yang akan dibawa menuju ke arah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 2 Keputusan Presiden RI No. 57 Tahun 2004 menetapkan gula sebagai barang yang berada dalam pengawasan pemerintah untuk importasi gula pasir

diatur tata niaganya oleh Menteri Perdagangan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 643/MPP/KEP/09/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula serta diperbaharui oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 572/MPP/09/2004 tentang Tata Niaga Impor Gula menyatakan bahwa penunjukan Importir Terdaftar (IT) Gula Kristal (Plention White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) gula selanjutnya disebut IT gula. Pelaku tertangkap diperjalanan oleh Polres Sanggau yang sedang mengadakan razia, pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat merugikan negara.

g. Putusan No. 879 K/Pid.Sus/2010

Pada putusan ini terjadi tindak pidana kepabeanaan berupa membantu terjadinya tindak pidana kepabeanaan<sup>85</sup> yaitu mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B (Pasal 104 huruf (a)). Barang yang dimaksud

---

<sup>85</sup> Sebagaimana telah dibahas pada Tinjauan Pustaka Skripsi ini hlm. 47 dengan berdasarkan pada buku Ali Purwito yang mengelompokkan Pasal 104 huruf a, b, c, dan d UU Kepabeanaan sebagai “membantu terjadinya tindak pidana kepabeanaan”

berupa gula pasir dan minyak goreng asal Malaysia dari arah Kecamatan Jagoi Babang ke arah Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Pelaku tertangkap ketika di tengah perjalanan mobil yang mengangkut gula pasir dan minyak asal Malaysia yang dikendarai oleh pelaku dihentikan oleh petugas kepolisian, dan pada saat ditanya mengenai dokumen kepemilikan barang tersebut, pelaku tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud.

h. Putusan No. 102 K/Pid.Sus/2008

Pada putusan ini terjadi tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor yaitu membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Pasal 102 huruf (b) UU Kepabeanan). Barang yang diimpor berupa gula pasir dari Malaysia menuju Alu Bu Tuha, Kecamatan Peurlak, Aceh Timur. Diperjalanan kapal yang digunakan mengangkut barang impor kehabisan bahan bakar dan berhenti di Muara Ujung Peurlak sehingga sebagian barang dibongkar di sana. Di sana pelaku tertangkap oleh TNI AL yang sedang melakukan patroli di perairan Aceh Utara hingga perairan Aceh Timur.

Dari putusan-putusan tersebut dapat diambil kesimpulan temuan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur pada

Pasal 102 dan 102A adalah yang paling banyak terjadi dan terjadi di wilayah perbatasan. Yang menjadi faktor penyebabnya, karena barang yang diangkut memang merupakan jenis barang yang dilarang ataupun dibatasi baik ekspor maupun impornya. Selain itu, penyelundupan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal diperbatasan. Hal ini dapat terlihat dari barang-barang yang diselundupkan antara lain, barang bekas, kayu, gula pasir, dan minyak goreng. Penemuan tindak pidana tersebut di atas hampir sama yaitu ditemukan oleh petugas yang sedang patroli (tertangkap tangan).

### 3. Berita-berita Terkait Tindak Pidana Kepabeanan

#### a. Penyelundupan Dua Kontainer Miras Berkedok Impor Kain<sup>86</sup> (berita tanggal 9 Maret 2016)

Kasus penyelundupan ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Kasus penyelundupan ini diketahui karena adanya laporan intelejen yang mencurigai aktifitas dari perusahaan PT. N. Biasanya PT. N mengimpor kain atau garmen yang biasanya berasal dari India atau Cina, namun kali tersebut PT. N mengimpor dari Singapura. Dari kecurigaan inilah kemudian aktifitas impor PT. N diawasi hingga PT. N ditemukan melakukan penyelundupan.

---

<sup>86</sup> <http://www.solopos.com/2015/12/01/miras-impor-berkedok-impor-kain-penyelundupan-2-kontainer-miras-digagalkan-666253>

b. Penyelundupan Empat Kontainer Buah Impor<sup>87</sup> (berita tanggal 29 Januari 2016)

Kasus penyelundupan ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Barang yang diselundupkan adalah empat kontainer buah jeruk, apel, kurma dan sayur asinan yang berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (PT. DMS) yang kantornya berada di Jakarta. Modus penyelundupan ini adalah dengan memberitahukan dalam dokumen pabean bahwa barang yang diimpor adalah buah pir, sebab buah pir adalah buah yang tidak dikenai pajak. Dalam kontainer buah pir diletakkan di bagian luar kontainer, buah yang diselundupkan diletakkan di bagian dalam kontainer, agar terhindar dari pemeriksaan petugas.

c. Penyelundupan barang impor senilai Rp.4,3 Miliar<sup>88</sup> (berita tanggal 23 November 2015)

Kasus ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Modus penyelundupan ini yaitu dengan membawa barang dari luar negeri yaitu Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi di sepanjang pesisir Sumatra. Kemudian, barang impor ini dikirim ke Jakarta seolah-olah barang ini berasal dari dalam

---

<sup>87</sup> <http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/01/29/476928/4-kontainer-buah-impor-ilegal-diamankan>

<sup>88</sup> <http://news.detik.com/berita/3078201/polres-pelabuhan-tj-priok-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-senilai-rp-43-m>



negeri untuk kemudian didistribusikan di Jakarta. Penyelundupan ini diketahui dari laporan masyarakat, kemudian Polres Tanjung Priok dan Ditjen Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap kapal yang membawa barang-barang selundupan tersebut. Barang yang diselundupkan antara lain garmen, tas, aksesoris, CCTV, sparepart otoparts, casing handphone, kosmetik, juga alat kesehatan seperti kursi roda, infus, dan lain-lain.

- d. Penyelundupan Empat Kontainer Tekstil Impor<sup>89</sup> (berita tanggal 16 Oktober 2015)

Penyelundupan ini ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Penemuan kasus ini merupakan jawaban dari keluhan para pengusaha tekstil dalam negeri dengan banyaknya impor pakaian terutama pakaian bekas juga impor tekstil ilegal. Impor empat kontainer tekstil ilegal ini diduga berasal dari Cina. Indonesia juga menjadi pilihan untuk melakukan penyelundupan khususnya tekstil, karena pangsa pasar di Indonesia sangat besar. Modus penyelundupan ini dilakukan dengan memberitahukan barang untuk dibongkar di kawasan berikat, ternyata barang tidak dibongkar di luar kawasan berikat, barang akan langsung dibawa ke pembeli akhir tanpa membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

---

<sup>89</sup> <http://bisnis.liputan6.com/read/2342030/jokowi-penyelundup-tekstil-impor-ilegal-sudah-jadi-tersangka>

- e. Penyelundupan pakaian bekas impor yang sulit dibendung<sup>90</sup>  
(berita tanggal 5 Februari 2015)

Sulitnya mengatasi impor pakaian bekas, sehingga pada tahun 2009 impor pakaian bekas dilarang. Sepanjang 2013-2015, Ditjen Bea Cukai sudah melakukan 34 kali penggalan penyelundupan pakaian bekas yang jumlahnya mencapai 25.600 bal. Satu bal berisikan 500 buah pakaian berupa celana, baju, jaket, dan sejenisnya. Satu bal pakaian bekas dijual dengan harga satu sampai dua juta rupiah kepada pedagang besar. Penyelundupan ini dilakukan lewat pesisir Sumatra melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat yang dalam pengawasannya sulit dilakukan oleh Bea Cukai karena adanya keterbatasan tenaga dan jumlah kapal.

- f. Penyebab terjadinya penyelundupan barang ke luar Indonesia<sup>91</sup> (berita tanggal 6 Juni 2014)

Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, ada tiga penyebab terjadinya penyelundupan barang dari Indonesia ke luar negeri. Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara barang dalam negeri dan di luar negeri. Misalnya harga BBM di Indonesia yang lebih murah dari Timor Leste

---

<sup>90</sup> <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njax3y-bea-cukai-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-sulit-dibendung>

<sup>91</sup> <http://finance.detik.com/read/2014/06/06/141640/2601688/4/3-penyebab-terjadinya-penyelundupan-barang-ke-luar-indonesia>

menimbulkan penyelundupan BBM dari Indonesia ke Timor Leste. Kedua, barang yang diselundupkan biasanya barang yang dilarang. Misalnya adanya larangan di Timor Leste untuk membeli BBM bersubsidi di Indonesia, jadi ada saja oknum yang menyelundupkan BBM ke Timor Leste. Ketiga, semakin tinggi tarif impor maupun ekspor, semakin berpeluang suatu barang diselundupkan.

Dari uraian tersebut di atas, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan, yaitu salah satunya penyelundupan adalah sebagai berikut.

1. Kondisi perakonomian dalam negeri

Adanya kesenjangan harga antara produk dalam negeri dan produk luar negeri di mana produk dari luar negeri yang diselundupkan harganya jauh lebih murah, yang tentu saja tidak dipungut bea masuk atas produk yang diselundupkan tersebut. Juga keadaan ekonomi masyarakat yang belum mapan, yang mendorong mereka untuk melakukan penyelundupan barang ke luar negeri utamanya hasil-hasil bumi di Indonesia untuk memperoleh pendapatan.

2. Komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas penyelundupan

Dari berita-berita tersebut di atas, yang mana kebanyakan penyelundupan ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok

menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai (pusat) bersama aparat penegak hukum setempat dalam hal ini Polri memiliki komitmen untuk memberantas penyelundupan, meskipun tidak dapat dihindari masih adanya oknum-oknum yang terindikasi melakukan kolusi.

3. Pengawasan terhadap wilayah Republik Indonesia khususnya wilayah perairan.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, hal ini meyulitkan pengawasan terhadapnya. Kekurangan sumber daya manusia juga sarana pengawasan menjadi faktor pendukung terjadinya penyelundupan.

Penanggulangan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah bentuk penanggulangan jangka panjang dalam tindak pidana kepabeanan yang sulit untuk dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana kepabeanan dengan memperhatikan modus operandi tindak pidana kepabeanan diperlukan. Berdasarkan uraian sebelumnya yang di dalamnya terdapat modus operandi tindak pidana kepabeanan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal pencegahan penyelundupan khususnya pengawasan barang yang keluar dan masuk daerah pabean khususnya pemeriksaan barang di pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. kejelian petugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang baik pemeriksaan administrasi terutama pemeriksaan fisik. Hal ini penting untuk menghadapi modus penyelundupan seperti pada berita penyelundupan empat kontainer buah yang telah di bahas sebelumnya;
2. pengawasan barang pasca impor, penting untuk menghadapi modus penyelundupan seperti pada berita penyelundupan empat kontainer tekstil impor, yang memberitakan dengan salah tujuan impor, bahwa tujuan barang yang diimpor untuk diekspor kembali (impor sementara) agar mendapat kemudahan, ternyata barang diimpor dengan tujuan langsung dipasarkan (impor untuk dipakai). Jurnal *World Costoms Organization* juga menekankan pentingnya pengawasan pasca impor dari keseluruhan pengawasan kegiatan ekspor impor utamanya impor<sup>92</sup>;
3. pengawasan barang dalam daerah pabean untuk mencegah tindak pidana kepabeanan dengan modus pengangkutan antar pulau seperti pada kasus penyelundupan barang impor senilai 4,3 Milyar yang telah dibahas sebelumnya.
4. bantuan teknologi dalam pengawasan di pelabuhan utamanya pelabuhan-pelabuhan dengan tingkat kesibukan aktifitas yang tinggi perlu didukung dengan bantuan teknologi agar pemeriksaan fisik terhadap barang menjadi efektif;

---

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 62.

5. peningkatan kemampuan intelejen. Dalam pencegahan penyelundupan, peran intelejen sangat penting dalam hal meneliti barang-barang yang masuk dan keluar daerah pabean seperti pada kasus penyelundupan dua kontainer miras berkedok impor kain yang merupakan hasil temuan intelejen.

Dari uraian tersebut di atas, kita bisa mengetahui, dari beberapa bentuk tindak pidana kepabeanan, semua pembahasan tersebut di atas, hanya berupa tindak pidana penyelundupan. Hal ini akan di bahas kemudian pada pembahasan mengenai pencegahan tindak pidana kepabeanan selanjutnya.

## **B. Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar**

### **1. Deskripsi Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar**

Pada pembahasan ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai nama pelabuhan. Pelabuhan yang dimaksud ini dikenal dengan nama Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Jika dikaitkan dengan instansi yang ada di dalamnya, nama pelabuhan ini adalah Pelabuhan Utama Makassar, berdasarkan nama otoritasnya yaitu Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Pelabuhan ini terdiri atas tiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Soekarno, Pelabuhan Hasanuddin dan Pelabuhan Hatta. Pelabuhan Soekarno merupakan pelabuhan yang diperuntukkan bagi barang

curah, pelabuhan kedatangan untuk mobil, dan pelabuhan untuk penumpang. Sedangkan Pelabuhan Hatta adalah pelabuhan untuk peti kemas atau terminal peti kemas. Pelabuhan Hatta inilah yang merupakan kawasan pabean. Maka, yang menjadi lokasi penelitian ini hanyalah Pelabuhan Hatta, karena yang menjadi kawasan pabean adalah Pelabuhan Hatta di mana kegiatan bongkar muat barang ekspor dan impor seharusnya dilakukan. Pelabuhan Hatta juga merupakan Terminal Petikemas Makassar yang dikelola oleh Kantor Terminal Petikemas Makassar (TPM) sebagai unit independen dan menjadi salah satu cabang dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya nama Pelabuhan Hatta dan TPM akan digunakan secara bergantian sesuai konteksnya.

Terdapat 4 *gate* di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yaitu Gate 1, Gate 2, Gate 3 dan Gate 4. *Gate* yang merupakan tempat keluar masuknya barang adalah Gate 1 dan 3. Gate 2 adalah tempat keluar masuknya penumpang, dan Gate 4 digunakan sebagai tempat keluar masuknya orang-orang yang berkeja dalam Terminal Peti Kemas pada bagian pengendalian operasi (Kantor Pengendalian Operasi atau KPO) TPM.

Pengelolaan pelabuhan berada di bawah beberapa instansi yang terdapat di dalam pelabuhan yaitu Kantor Terminal Peti Kemas (TPM), KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar,

Syahbandar, Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dan PT. Pelindo IV.

## **2. Pengawasan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Hatta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar**

Pengawasan lalu lintas barang merupakan upaya pencegahan tindak pidana kepabeanan, juga untuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi ekspor impornya (barang lartas).

Pada pengawasan barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan manajemen resiko (*risk management*) lewat sistem penjaluran. Sistem penjaluran adalah cara yang dilakukan dalam pengawasan barang, mengingat banyaknya barang yang ekspor dan impor yang keluar masuk di pelabuhan, dan untuk memeriksa seluruh barang ekspor impor yang ada di pelabuhan akan menghabiskan waktu yang lama dan juga menghambat kegiatan distribusi barang dan akhirnya mengganggu kegiatan ekonomi. Untuk itu sistem penjaluran diterapkan agar pemeriksaan barang di pelabuhan efektif.

Di KPPBC Tipe Madya Pebean B Makassar sistem penjaluran untuk impor terbagi tiga yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, dan untuk ekspor hanya ada dua jalur yaitu jalur merah dan



jalur hijau. Sedangkan jalur MITA (Mitra Utama) prioritas dan jalur MITA Non Prioritas tidak ada di Pelabuhan Hata Makassar.

Barang-barang yang masuk ke jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau ditentukan lewat sistem Pemrosesan Data Elektronik (PDE) yang dilakukan oleh bagian Informasi Kepabeanan dan Cukai (pusat). Jadi penentuan barang yang masuk ke masing-masing jalur bukan ditentukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, melainkan ditentukan oleh DJBC di pusat melalui sistem komputer. Namun, biasanya sistem penyaluran ditentukan oleh tiga faktor yaitu profil perusahaan, profil komoditas, dan ada atau tidaknya laporan intelejen. Berikut ini uraian mengenai jalur-jalur tersebut :

a. Impor

1) Jalur merah

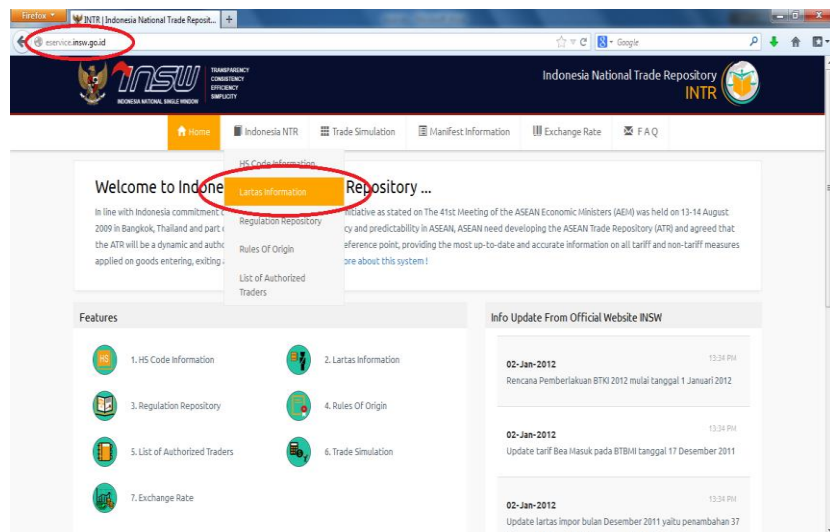
Barang-barang yang masuk ke jalur merah biasanya yaitu:

- a) barang importir yang masih baru;
- b) barang dari importir yang menggunakan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- c) barang yang termasuk kategori lartas; dan
- d) barang yang dicurigai karena adanya laporan intelejen. Jadi meskipun barang dari suatu perusahaan sudah berada di jalur hijau, jika ada

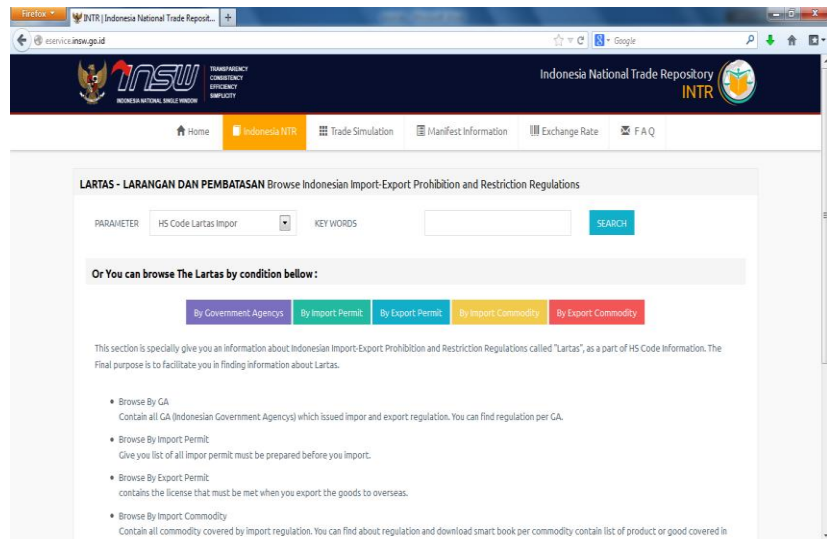
laporan dari intelejen, barang yang berada di jalur hijau bisa diturunkan statusnya ke jalur merah.

Dari jenis barang-barang tersebut di atas, saya akan membahas barang yang termasuk kategori lartas. Barang lartas adalah barang yang dilarang maupun dibatasi ekspor maupun impornya untuk menjalankan fungsi perlindungan. Barang-barang yang termasuk kategori lartas ditetapkan oleh berbagai instansi terkait, dalam hal ini instansi-instansi tersebut menitipkan aturannya kepada Bea Cukai untuk dilakukan pengawasan terhadap barang yang instansi tersebut larang atau batasi baik ekspor maupun impornya. Juga untuk melakukan ekspor maupun impor barang yang termasuk kategori lartas harus ada izin dari instansi terkait dan izin ini nanti akan dilakukan pengecekan oleh Bea Cukai. Contoh, ada importir yang mau mengimpor bahan baku pembuatan freon AC. Bea Cukai akan mengecek apakah importir tersebut sudah memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, karena bahan baku pembuatan freon AC merupakan barang yang termasuk kategori lartas, utamanya R<sub>22</sub> yang dilarang dan sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia.

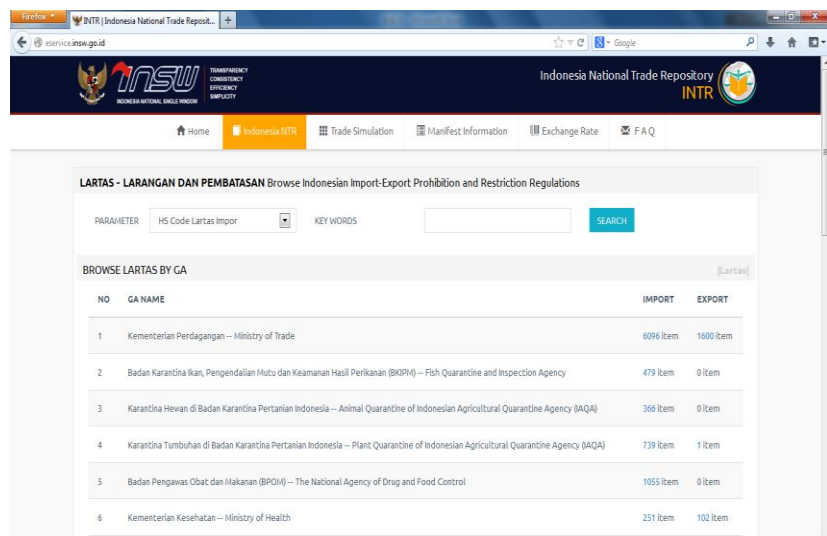
Untuk mengetahui barang yang termasuk dalam kategori lartas, bisa dilihat pada alamat website [eservice.insw.go.id](http://eservice.insw.go.id) kemudian klik Indonesia NTR, kemudian pilih Lartas Information seperti pada gambar di bawah.



Selanjutnya kita dapat daftar barang lartas berdasarkan instansi yang menerbitkan, izin impor, izin ekspor, dan komoditas ekspor dan impor seperti pada gambar di bawah.



Berikut ini gambar jika kita mengklik *By Government Agency*



Akan muncul sejumlah nama instansi yang menitipkan aturannya kepada DJBC, agar barang tersebut diawasi ekspor impornya.

Barang yang masuk ke jalur merah diperiksa dokumen dan fisik barangnya.

## 2) Jalur kuning

Barang-barang yang masuk ke jalur kuning biasanya adalah barang-barang importir yang sudah sering melakukan kegiatan impor tapi komoditas yang diimpor merupakan barang yang beresiko. Jadi importir yang sudah lama di jalur merah dan tidak pernah ditemukan melakukan pelanggaran akan dinaikkan status barangnya ke jalur kuning.

Barang-barang yang berada di jalur kuning hanya diperiksa dokumennya.

## 3) Jalur hijau

Barang-barang yang masuk ke jalur hijau adalah barang-barang milik importir yang sudah lama dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta memiliki profil perusahaan yang baik. Baik tidaknya profil suatu perusahaan dapat dilihat antara lain dari pembukuan perusahaan tersebut serta sistem pengendalian internal perusahaan yang berjalan baik.

Barang yang melalui jalur hijau bisa langsung diambil oleh importir, importir bisa menyelesaikan kewajibannya 30 hari setelah barang diambil apabila terjadi misalnya ada kekurangan pembayaran.

b. Ekspor

1) Jalur merah

Barang-barang yang masuk ke jalur merah biasanya yaitu:

- a) barang yang kena pungutan negara;
- b) barang yang diekspor dengan tujuan diimpor kembali;
- c) barang yang diimpor untuk diekspor kembali (barang impor sementara).

Barang yang masuk ke jalur merah hanya diperiksa dokumennya.

2) Jalur hijau

Barang yang masuk ke jalur hijau adalah barang-barang yang tidak termasuk kategori barang-barang yang masuk ke jalur merah. Jadi selain barang-barang yang masuk ke jalur merah tersebut di atas, barang tersebut masuk ke jalur hijau.

Bantuan teknologi seperti *Gamma Ray*, *Hi-Co Scan Double*, dan *X-Ray Inspection System* untuk pemeriksaan fisik barang tidak terdapat di Pelabuhan Hatta Makassar. Setiap tahun KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar melakukan pemeriksaan acak sebanyak 2% (dua persen) dari keseluruhan barang ekspor dan impor yang ada di Pelabuhan Hatta Makassar. Selama ini belum

ditemukan pelanggaran maupun tindak pidana dari hasil pemeriksaan acak ini.

Dari uraian tersebut di atas juga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagai berikut :

a. Fungsi perlindungan

Direktorat Jenderal Bea Cukai melaksanakan fungsi perlindungan utamanya dengan cara mencegah dan membatasi masuknya barang-barang tertentu di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap barang yang termasuk kategori barang lartas ke Indonesia.

b. Fungsi *trade facilitator*

Fungsi *trade facilitator* kepabeanan dapat terlihat dari adanya kemudahan prosedur bagi barang ekspor salah satunya yaitu barang impor hanya dibagi atas dua jalur yaitu jalur hijau dan jalur merah. Selain itu terhadap barang ekspor hanya diperiksa dokumennya. Prosedur ekspor mudah dilakukan untuk mendorong peningkatan aktifitas ekspor dalam negeri.

c. Sumber pendapatan negara

Meskipun tidak dijelaskan pada bagian ini sebelumnya, namun dari ketiga fungsi utama kepabeanan, ternyata fungsi inilah yang paling dominan dari ketiga fungsi utama

kepabeanan. Sekitar 30% pendapatan negara diharapkan diperoleh dari pungutan bea dan cukai.

### **3. Pengawasan Barang yang Keluar dan Masuk di Terminal Petikemas Makassar**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada deskripsi pelabuhan sebelumnya bahwa Pelabuhan Hatta adalah merupakan terminal peti kemas, juga merupakan kawasan pabean. Pelabuhan Hatta berada di bawah pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPM). Pengecekan terhadap peti kemas yang keluar masuk TPM berada di Gate 3. Gate 3 terdiri atas empat pintu, yaitu dua *gate in* (satu untuk peti kemas kosong dan satu untuk peti kemas yang memiliki muatan atau terisi), satu *gate out*, dan satu *gate* untuk Bea Cukai.

Arus keluar masuk barang yang ada di TPM ada pada kegiatan *receiving* dan *delivery* yang merupakan dua dari beberapa usaha yang dijalankan TPM. Untuk menggunakan jasa *receiving* dan *delivery* yang ditawarkan oleh TPM, para pengguna jasa harus mengurus *receiving jobslip* dan *delivery order jobslip* di kantor TPM. Untuk kegiatan pengiriman dan penerimaan barang domestik prosedurnya secara garis besar hanya mengurus pengajuan pelayanan dan resi muat. Sedangkan untuk barang ekspor impor harus ada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk barang yang akan diekspor dan Pemberitahuan Impor



Barang (PIB) untuk barang yang akan diimpor. Pengurusan PEB dan PIB inilah yang harus melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar terlebih dahulu. Jadi eksportir maupun importir harus mengurus PEB atau PIB di Kantor Bea Cukai terlebih dahulu, kemudian PEB dan PIB tersebut nanti akan dibawa ke Kantor TPM untuk mengurus *jobslip*. *Jobslip* inilah juga yang akan diperiksa di *gate* pada saat truk-truk pengangkut peti kemas masuk dan keluar dari TPM. Berdasarkan *receiving jobslip* penerima barang mengeluarkan barang dari dalam TPM, dan berdasarkan *delivery order jobslip* pengirim barang memasukkan barang ke dalam TPM.

Pemeriksaan barang yang masuk ke TPM dilakukan di *gate*. Data dari semua truk yang masuk ke TPM telah ada pada aplikasi komputer di pos petugas *gate*. Barang yang masuk ke *gate*, pertama-tama akan dicocokkan *jobslip*nya dengan truk yang mengangkut dan peti kemas yang diangkutnya. Yang dicek dari peti kemas adalah kesesuaian kode peti kemas yang tertera pada peti kemas dan kode peti kemas yang ada di *jobslip*. Selanjutnya dilakukan pengecekan fisik peti kemas, apakah peti kemas ringsek, berlobang, dan lain-lain. Selain itu, segel peti kemas dicocokkan dengan peti kemas, masing-masing peti kemas memiliki satu segel dan kode segel peti kemas harus sama dengan kode peti kemas karena masing-masing peti kemas hanya

memiliki satu segel dan segel masing-masing peti kemas berbeda. Kemudian peti kemas akan ditimbang, karena muatan peti kemas tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan.

Adapun kegiatan *stripping* (memasukkan barang dalam peti kemas) dan *stuffing* (mengeluarkan barang dari dalam peti kemas) tidak diperbolehkan dilakukan di dalam TPM, kecuali untuk barang impor dan harus dilakukan di *Container Freigh Station (CFS)*. *Container Freigh Station* juga merupakan tempat pemeriksaan fisik barang untuk barang yang masuk ke jalur merah.

Dari keseluruhan barang yang keluar dan masuk di TPM, hanya sekitar 20% yang merupakan barang ekspor maupun impor. Dan hanya 20% barang inilah yang diawasi oleh petugas Bea Cukai, karena peraturan kepabeanan hanya melekat pada barang ekspor dan impor, sedangkan barang domestik tidak diawasi oleh petugas Bea Cukai. Adapun dari keseluruhan barang yang diawasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, sekitar 65% (enam puluh lima persen) berada di jalur hijau, 20% (dua puluh persen) berada di jalur kuning, dan sisanya sekitar 15% berada di jalur merah. Presentase ini untuk menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang ada di Pelabuhan Hatta berada di jalur hijau dan hanya sebagian kecil yang ada di jalur merah.

Dari serangkaian proses pemeriksaan barang yang telah diuraikan di sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang

dapat diketahui dari peti kemas yang keluar dan masuk ke TPM hanya beratnya sedangkan, isi barang yang keluar dan masuk ke TPM tidak diketahui, kecuali isi peti kemas impor yang masuk ke dalam jalur merah yang diperiksa fisik barangnya dan barang yang terkena pemeriksaan acak.

#### 4. Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Hatta

Selama ini, di Pelabuhan Hatta belum pernah terjadi baik pelanggaran terlebih tindak pidana kepabeanan. Namun, berikut ini data hasil penindakan kepabeanan KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

##### Data Hasil Penindakan Kepabeanan (Tahun 2013–2016)

No.	Tanggal	Lokasi Penindakan	Uraian Detail Barang	Ketentuan yang Dilanggar	Uraian Modus
1	16-04-2016	Lapangan <i>Container Freight Station</i> Terminal Petikemas Makassar	30 buah Scoop	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat-syarat diimpor atau diekspor	Mengirim barang tanpa dilengkapi izin dari industri terkait
2	08-04-2016	<i>Mail Processing Center</i> Makassar, 90400	2 paket kiriman berupa 2 buah Sex Toys	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
3	08-04-2016	<i>Mail Processing Center</i> Makassar,	1 paket kiriman berupa 12 buah	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea

		90400	anak panah	instansi lain)	
4	08-04-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	Satu paket kiriman berupa 1 buah sex toy	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
5	18-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 2 buah repeater	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
6	18-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 2 buah repeater	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
7	18-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 2 buah repeater	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
8	15-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	2 buah sex toys	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
9	15-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 6 buah sex toys	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
10	15-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 2 buah repeater	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
11	15-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 buah sex toy	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
12	15-03-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket kiriman berupa 2 buah repeater	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Pos Lalu Bea
13	19-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 buah majalah	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
14	19-02-2016	<i>Mail Processing</i>	1 paket kiriman	Tidak tercantum dalam UU	Mengirim barang lartas

		<i>Center Makassar, 90400</i>	berupa 2 buah <i>assesoris airsoftgun</i>	Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	
15	19-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket berupa 2 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
16	19-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar, 90400</i>	1 paket berupa 2 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
17	16-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar</i>	1 set <i>airsoftgun</i> dan <i>assesoris</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
18	15-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar</i>	5 buah <i>sex toys</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
19	11-02-2016	<i>Mail Processing Center Makassar</i>	1 paket berupa 12 anak panah	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
20	04-02-2016	Kantor Pos Daya	1 buah <i>crossbow</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang kategori lartas melalui kantor pos
21	27-01-2016	Kantor Pos Daya	1 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
22	27-01-2016	Kantor Pos Daya	1 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
23	27-01-2016	Kantor Pos Daya	1 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
24	27-01-2016	Kantor Pos Daya	1 buah <i>sex toy</i>	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
25	27-01-2016	Kantor Pos	1 buah	Tidak tercantum	Mengirim barang

		Daya	sex toy	dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
26	21-01-2016	Kantor Pos Daya	1 bungkus sex toys	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
27	12-01-2016	Kantor Pos Daya	1 buah sex toy	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas melalui Kantor Pos Lalu Bea
28	08-01-2016	Kantor Pos Daya	2 buah sex toys	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
29	08-01-2016	Kantor Pos Daya	1 bungkus sex toy	Tidak tercantum dalam UU Kepabeanan dan Cukai (peraturan instansi lain)	Mengirim barang lartas
30	07-01-2016	Kantor Pos Daya	2 bungkus narkotika (disembunyikan pada dinding palsu buku Pendidikan Agama)	Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (Pasal 102 huruf (e) UU Kepabeanan)	Menyembunyikan pada dinding palsu buku Pendidikan Agama
31	07-01-2016	Kantor Pos Daya	2 bungkus <i>Metamphetamine</i>	Meyembunyikan barang impor secara melawan hukum	Menyembunyikan di balik dinding palsu sebuah buku pendidikan agama
32	02-12-2015	Terminal Petikemas Makassar	1 unit <i>guh elevator</i>	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan senjata (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Tidak sesuai dengan pemberitahuan
33	02-12-2015	Terminal Petikemas Makassar	1 unit <i>guh wiz elevator</i>	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Tidak sesuai dengan pemberitahuan
34	24-11-2015	Kantor Pos Daya	2 paket sex toys	Memberitahukan salah jenis dan atau	Mengirim lartas dengan

				jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	pemberitahuan hadiah
35	18-11-2015	Kantor Pos Daya	1 buah sex toys	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi diimpor atau diekspor (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan hadiah
36	18-11-2015	Kantor Pos Daya	12 buah anak panah	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan hadiah
37	15-11-2015	Jalan Ir. Sutami Gudang 30 E Makassar	35600 paket <i>decorative wallpaper</i>	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Tidak sesuai dengan pemberitahuan manifes
38	06-11-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan tidak benar
39	06-11-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU	Mengirim barang dengan pemberitahuan tidak benar

				Kepabeanan)	
40	05-11-2015	Kantor Pos Daya	20 pallet obat-obatan	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas dengan pemberitahuan pakaian
41	04-11-2015	Kantor Pos Daya	1 paket <i>crossbow</i> , 3 buah anak panah	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan mainan
42	05-10-2015	Kantor Pos Daya	1 paket <i>crossbow</i>	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan hadiah
43	01-10-2015	Kantor Pos Daya	3 paket <i>sex toy</i>	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan hadiah
44	27-09-2015	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	1 buah <i>sex toy</i>	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU	Menyimpan barang lartas tersebut di dalam koper di antara beberapa pakaian



				Kepabeanan)	
45	11-09-2015	Kantor Pos Daya	1 buah sex toys	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan barang tersebut adalah hadiah
46	11-09-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan barang tersebut adalah hadiah
47	11-09-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang impor melalui kantor pos dengan pemberitahuan hadiah
48	11-09-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan hadiah
49	11-09-2015	Kantor Pos Daya	2 set mata panah	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan mainan

				barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	
50	31-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan hadiah
51	14-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket (nama barang tidak ada)	Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang tidak benar (Pasal 103 huruf (c) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan tidak benar
52	14-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang tidak benar (Pasal 103 huruf (c) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang tanpa pemberitahuan yang benar
53	14-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan memberitahukan isi barang tersebut adalah hadiah
54	12-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	-	mengirim barang dengan pemberitahuan yang tiudak benar
55	12-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket defusable , 1 paket sparepart airsoftgun	-	Mengirim barang dengan pemberitahuan Hobby Model Kit dan Merchandise
56	04-08-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	-	Mengirim lartas dengan pemberitahuan sabun
57	04-08-2015	Kantor Pos Daya	1 bungkus	Memberikan keterangan lisan	Mengirim lartas dengan

			sex toys	atau tulisan yang tidak benar (Pasal 103 huruf (c) UU Kepabeanan)	pemberitahuan mainan
58	01-08-2015	Kantor Pos Daya	1 bungkus (nama barang tidak ada)	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang yang dilarang atau dibatasi diimpor atau diekspor (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Mengirim barang dengan pemberitahuan kado
59	02-07-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim lartas melalui kantor pos
60	02-07-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim lartas melalui kantor pos
61	02-07-2015	Kantor Pos Daya	1 set crossbow	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim lartas melalui kantor pos
62	25-06-2016	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas dengan pemberitahuan mainan
63	25-06-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102	Mengirim barang lartas dengan pemberitahuan mainan

				huruf (h) UU Kepabeanan)	
64	25-06-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas dengan pemberitahuan mainan
65	25-06-2015	Kantor Pos Daya	3 buah sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas dengan pemberitahuan mainan
66	18-05-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang impor tanpa pemberitahuan yang benar
67	18-05-2015	Kantor Pos Daya	2 paket sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos
68	18-05-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toy	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos
69	18-05-2015	Kantor Pos Daya	1 buah sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos
70	18-05-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos
71	18-05-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan	Mengirim barang lartas melalui kantor pos

				sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	
72	27-04-2015	Kantor Pos Daya	1 buah <i>crossbow</i> , 6 buah anak panah, 1 buah <i>accessories crossbow</i> , 1 buah powerstrap	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang dengan sengaja (pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui kantor pos dengan pemberitahuan yang berbeda dengan barang
73	07-03-2015	Gudang Pangkalan Hatta	3 paket mesin bor, 2 paket mesin pemotong (gurinda)	Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes (Pasal 102 huruf (a) UU Kepabeanan)	Tidak memberitahukan barang dalam dokumen
74	04-02-2015	Kantor Pos Daya	1 paket sex toys	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas melalui kantor pos tanpa pemberitahuan isi dari paket tersebut
75	30-01-2015	Kantor Pos Daya	1 paket senjata	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas melalui kantor pos tanpa memberitahukan isi paket tersebut
76	14-01-2015	Kantor Pos Daya	12 buah anak panah	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas berupa senjata tanpa izin dari pihak terkait
77	14-01-2015	Kantor Pos Daya	5 paket majalah	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	-
78	12-01-2015	Kantor Pos	50 butir	Salah	Mengirimkan melalui

		Daya	ekstasi, 3 gram <i>metamph etamine</i> (shabu)	memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	kantor pos dengan cara memasukkan dalam paket dokumen
79	06-01-2015	Kantor Pos Daya	12 buah anak panah, mata panah	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang sebanyak 2 paket senjata yang dikategorikan barang lartas tanpa izin dari pihak terkait
80	05-01-2015	Kantor Pos Daya	1 buah ketapel, 1 buah anak panah	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang sebanyak 2 paket berupa senjata yang dikategorikan barang lartas melalui kantor pos tanpa izin dari pihak terkait
81	02-01-2015	Kantor Pos Daya	1 paket <i>rescurve crossbow</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas berupa senjata <i>crossbow</i> melalui kantor pos tanpa izin dari pihak terkait
82	02-01-2015	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas melalui kantor pos
83	12-11-2014	Kantor Pos Daya	26 butir ekstasi	Memberitahukan salah jenis dan atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	Mengirim narkotika dengan menggunakan jasa kantor pos di mana paket tersebut berisi narkotika yang tersimpan dalam tempat DVD
84	31-10-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas berupa <i>sex toy</i> melalui impor pos

85	08-10-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas melalui impor pos
86	06-10-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas tanpa pemberitahuan yang benar
87	03-10-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas berupa <i>sex toy</i> melalui impor pos
88	30-09-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toys</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan barang lartas melalui impor pos
89	29-09-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan <i>sex toy</i> tanpa pemberitahuan yang benar
90	16-09-2014	Kantor Pos Daya	Obat- obatan (50 butir <i>Donna Capsule</i> , 10 butir <i>Donna Forte Capsule</i> , 209 butir <i>Pontacid Capsule</i> , 280 <i>Reximide Capsule</i> ,	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan obat- obatan dalam jumlah banyak tanpa izin dari pihak terkait

			530 <i>Tempol</i> <i>Paraceta</i> <i>mol</i> , 110 butir <i>Natberry</i> <i>Tablet</i> , 570 butir <i>Rhemofe</i> <i>nax</i> <i>Capsule</i> , 90 butir <i>Kontamin</i> <i>Tablet</i> , 100 butir <i>Acugrain</i> <i>Tablet</i> )		
91	01-09-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart</i> <i>airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirim barang lartas
92	22-08-2014	Kantor Pos Daya	1 paket berisi 10 macam <i>sparepart</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Salah memberitahukan barang kiriman
93	21-08-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Pengiriman barang melalui kantor pos
94	18-08-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Pengiriman barang melalui kantor pos
95	24-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor	Pengiriman barang melalui kantor pos



				(Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	
96	24-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Pengiriman barang melalui jasa pos
97	23-07-2015	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Membawa satu unit <i>sex toy</i>
98	23-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Pengiriman barang kiriman kantor pos
99	15-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman paket
100	14-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman <i>sparepart airsoftgun</i>
101	08-07-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman pos <i>sex toy</i>
102	24-06-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat	Kiriman <i>sparepart airsoftgun</i>

				diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	
103	16-06-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman pos berisi <i>sparepart airsoftgun</i>
104	23-05-2014	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	19 kotak <i>eye spray</i> , 20 botol suplemen merek Simpoal, 40 suplemen merek Semalu	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirim lewat jasa kargo
105	28-04-2014	Kantor Pos Daya	7 botol suplemen	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman berupa 7 botol suplemen extreme
106	14-04-2014	Kantor Pos Daya	1 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Kiriman pos berupa <i>sparepart airsoftgun</i>
107	06-02-2014	PT. IKI Makassar	1 unit kapal MT Zakaria 3	Pengangkut yang tidak menyerahkan RKSP sesuai ketentuan (Pasal 7A ayat (7) UU Kepabeanan)	Tidak melampirkan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)
108	02-11-2013	Terminal Petikemas Makassar	-	Mengangkut barang tertentu yang kurang/lebih dari pemberitahuan (Pasal 8C ayat (3) UU Kepabeanan)	Memberitahukan dengan salah nilai pabean
109	30-10-2013	Kantor Pos Daya	1 unit <i>sex toy</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat	Mengirimkan barang lartas <i>sex toy</i> melalui jasa kantor pos

				diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	
110	15-07-2013	Kantor Pos Daya	448 butir viagra kapsul	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengimpor viagra kapsul melalui jasa kiriman pos
111	28-06-2013	Terminal Petikemas Makassar	2402 kantong <i>Cocoa Residue</i>	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja (Pasal 102 huruf (h) UU Kepabeanan)	PEB Nomor 005845 tanggal 26-06-2013 atas nama Cahaya Makmur Cemerlang dengan tujuan <i>Cocoa House</i> SDN BHD LOT 6 Malaysia, jenis barang diberitahukan <i>Cocoa Residue</i> tarif 1802. Diduga jenis barang yang diekspor merupakan kakao dalam bentuk biji
112	24-05-2013	Kantor Pos Daya	1 karton obat-obatan berbagai jenis dengan tulisan Cina	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan 1 karton obat-obatan Cina melalui kantor pos
113	01-05-2013	Kantor Pos Daya	1 paket <i>assesoris airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Menerima <i>assesoris sparepart airsoftgun</i> melalui kantor pos
114	09-04-2013	Kantor Pos Daya	1 paket <i>assesoris airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Menerima <i>sparepart airsoftgun</i> melalui kantor pos
115	08-04-2013	PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar	1 unit Kapal Roro "Raja Laut"	Mengeluarkan barang impor tanpa izin petugas Bea dan Cukai (Pasal 102 huruf (f) UU	Memindahkan Kapal Roro Keluar Kawasan Pabean tanpa izin

				Kepabeanan)	
116	29-03-2013	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	Paket 1 : 485 gram <i>Methapet amine</i> , paket 2: 521 <i>Methapet amine</i>	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang lartas diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Menyembunyikan 2 paket <i>Methapetamine</i> di dalam dinding tas jinjing
117	18-02-2013	Kantor Pos Daya	1 unit sex toy	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirimkan sex toy
118	17-02-2013	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	300 gram <i>Methapet amine</i> , 2 butir <i>Extacy</i>	Tidak memberitahukan dan/atau memberitahukan secara tidak benar barang lartas diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan)	Menyembunyikan <i>Methapetamine</i> di dalam ulumunium foil yang dililiti pakain kotor
119	28-01-2013	Kantor Pos Daya	9 paket <i>sparepart airsoftgun</i>	Salah memberitahukan barang lartas yang tidak memenuhi syarat diimpor/diekspor (Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan)	Mengirim <i>sparepart airsoftgun</i> tanpa dilengkapi dokumen pelengkap

Sumber : KKPBC Tipe Madya Pabean B Makassar Tahun 2013-2016

Tindak lanjut dari penindakan tersebut di atas, yaitu :

- barang hasil penindakan menjadi barang yang dikuasai negara (sebagaimana diatur pada Pasal 68 ayat (1) UU Kepabeanan);
- barang hasil penindakan menjadi barang milik negara (sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) UU Kepabeanan);

- c. ada barang yang dikembalikan;
- d. barang hasil penindakan diserahkan (untuk narkoba, diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN)).

Tidak ada penindakan yang ditindak lanjuti sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi administrasi maupun penindakan yang ditindak lanjuti sebagai tindak pidana.

Meskipun di Pelabuhan Hatta tidak pernah terjadi tindak pidana kepabeanan, di bawah ini akan dijelaskan pencegahan dari masing-masing tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Hatta berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat sebelumnya pada bagian Tinjauan Pustaka.

- a. Penyelundupan

Untuk pencegahan penyelundupan di Pelabuhan Hatta Makassar dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan diterapkan manajemen resiko lewat sistem penjaluran. Sistem penjaluran ini telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pengawasan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Hatta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

- b. Perilaku deviasi

Tindak pidana perilaku deviasi hampir tidak mungkin terjadi di Pelabuhan Hatta. Selain karena Pelabuhan Hatta memang merupakan pelabuhan tujuan (kawasan pabean,

setiap kapal yang akan merapat ke dermaga Pelabuhan Hatta Makassar harus melengkapi sejumlah dokumen dan ditetapkan oleh Otoritas pelabuhan Utama Makassar sebelum merapat ke pelabuhan. Setiap hari akan diadakan rapat di Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk mengecek kesiapan kapal untuk merapat ke dermaga pelabuhan, apakah dokumennya sudah lengkap. Apabila dokumen kapal sudah lengkap maka kapal kemudian ditetapkan untuk merapat ke pelabuhan esok hari. Banyaknya jumlah kapal yang akan merapat ke dermaga Pelabuhan Hatta sedangkan panjang dermaga Pelabuhan Hatta yang terbatas pajangnya bahkan membuat para pemilik perusahaan pelayaran berebut agar kapalnya bisa lebih dulu merapat ke dermaga.

Jadi pada intinya di Pelabuhan Hatta tidak sembarang kapal bisa merapat ke dermaga pelabuhan. Kapal yang akan merapat ke dermaga harus melewati prosedur tersebut di atas.

c. Pemalsuan dokumen pabean

Dokumen pabean sangat penting dalam hal audit kepabeanan sebagaimana diatur pada Pasal 86 sampai Pasal 89 UU Kepabeanan tentang pemeriksaan pembukuan. Pemeriksaan pembukuan dilakukan salah satunya untuk

mengetahui apakah suatu perusahaan (eksportir atau importir) telah melakukan pembayaran bea secara benar.

Terakhir pada tahun 2013 audit kepabeanan masih dilakukan oleh kantor wilayah. Namun setelah itu audit kepabeanan diambil alih oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di pusat. Instansi Bea Cukai juga masih kesulitan untuk mengungkap apabila terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen. Selama ini, dokumen-dokumen dalam pengurusan urusan kepabeanan yang dikirimkan oleh perusahaan eksportir dan importir adalah dokumen hasil fotokopi, walaupun petugas Bea Cukai melakukan audit ke perusahaan tersebut akan sulit memperoleh dokumen yang asli.

d. Illegal akses ke sistem komputer pabean

Keberadaan aturan tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean memang penting, karena hampir seluruh kegiatan kepabeanan dilakukan melalui sistem komputer. Salah satu contohnya penjaluran barang yang dilakukan lewat sistem.

Dalam pembahasan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal pada Tinjauan Pustaka telah dijelaskan pentingnya suatu aturan hukum khususnya hukum pidana harus mampu mengakomodir kejahatan yang akan terjadi

masa mendatang. Pentingnya sistem komputer pabean dalam pelaksanaan tugas kepabeanan, bisa saja disalahgunakan.

Untuk mengakses sistem komputer pabean, tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Petugas Bea Cukai yang akan melakukan akses ke sistem komputer harus *log in* terlebih dahulu dengan memasukkan *username* dan *password*. Dengan demikian, memang hanya petugas Bea Cukai yang dapat mengakses sistem komputer. Hal ini juga sebagai upaya pencegahan tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean.

e. Membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan

Membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan, terdiri atas 4 (empat) perbuatan sebagai berikut :

- 1) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana;
- 2) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan;
- 3) menghilangkan, meyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemeritahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- 4) menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang



diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan.

Keempat perbuatan tersebut akan dibagi menjadi dua pembahasan. *Pertama*, perbuatan pada nomor 2, 3, dan 4 adalah perbuatan yang masih berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean. *Kedua*, perbuatan pada nomor 1 yaitu mengangkut barang dari hasil tindak pidana. Perbuatan mengangkut barang dari hasil tindak pidana utamanya mengangkut barang hasil penyelundupan sangat sulit untuk diketahui.

Adanya modus penyelundupan melalui wilayah perbatasan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah perbatasan seperti di pesisir Sumatra, kemudian didistribusikan ke pulau lain seolah-olah barang hasil penyelundupan adalah produk domestik menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukannya. Contoh, barang diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia melalui wilayah perbatasan seperti lewat pesisir Sumatra atau lewat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Kemudian barang hasil selundupan tersebut didistribusikan ke tempat atau pulau lain seolah-olah barang tersebut berasal dari dalam negeri, maka aparat penegak hukum khususnya petugas Bea Cukai akan sulit menemukannya karena yang diawasi oleh petugas Bea

Cukai hanyalah barang yang diketahui merupakan barang ekspor impor, sedangkan barang selundupan yang disembunyikan identitasnya seolah-olah barang tersebut berasal dari dalam negeri tentu saja tidak diawasi oleh petugas Bea dan Cukai. Contoh kasus pada berita penyelundupan barang impor senilai Rp.4,3 Milyar.

f. Perusakan segel pabean

Pemasangan segel dilakukan terhadap barang ekspor atau impor yang belum diselesaikan kewajibannya sehingga perlu dipasang segel. Segel pabean yang dipasang adalah tanggungjawab petugas yang memasang segel tersebut.

Dari beberapa bentuk tindak pidana kepabeanan tersebut di atas, hampir seluruh kasus yang terungkap adalah penyelundupan. Hal ini disebabkan kemampuan dan penguasaan aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana kepabeanan masih pada tindak pidana penyelundupan. Adapun tindak pidana kepabeanan yang cukup rumit yaitu pemalsuan dokumen pabean, instansi Bea Cukai masih mengalami kesulitan dan keterbatasan-keterbatasan dalam mengungkapkannya.

Dari keseluruhan bentuk tindak pidana kepabeanan, memang tindak pidana yang paling dominan dan marak terjadi adalah tindak pidana penyelundupan. Dalam hal ini kita kembali kepada pengertian kepabeanan bahwa kepabeanan adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan lainnya masih merupakan tindak pidana yang terkait dengan penyelundupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari bagian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan jawaban masing-masing rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan khususnya penyelundupan adalah :
  - a. lemahnya kondisi perekonomian dalam negeri;
  - b. adanya oknum-oknum penegak hukum yang melakukan kolusi;
  - c. sulitnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Selain-faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam hal ini penyelundupan di atas, yang perlu diperhatikan dalam pencegahan tindak pidana kepabeanan dalam hal ini penyelundupan adalah modus-modus penyelundupan khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama, sebagai berikut:

- a. memberitahukan secara salah jenis barang yang diimpor. Hal ini biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang barangnya sudah masuk ke jalur kuning karena di jalur kuning hanya dokumen barang yang diperiksa sedangkan fisik barang tidak diperiksa;

- b. meletakkan barang selundupan pada bagian dalam peti kemas, sehingga pada saat diperiksa oleh petugas, barang selundupan bisa luput dari pemeriksaan petugas;
  - c. menyelundupkan barang ke wilayah perbatasan, dan didistribusikan ke tempat lain dalam negeri seolah-olah barang tersebut adalah barang domestik sehingga terhindar dari pengawasan petugas Bea dan Cukai;
  - d. memberitahukan secara salah peruntukkan barang impor atau ekspor untuk memperoleh kemudahan dan menghindari pungutan misalnya barang impor diberitahukan untuk diekspor kembali ternyata barang tersebut langsung dipasarkan.
2. Pencegahan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Hatta dilakukan melalui pengawasan terhadap barang ekspor dan impor yang masuk dan keluar Pelabuhan Hatta. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan manajemen resiko yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem penjaluran. Yang menjadi kekurangan dalam pengawasan barang ekspor dan impor di Pelabuhan Hatta adalah belum ada bantuan alat pemeriksa peti kemas seperti *Gamma Ray*, *Hi-Co Scan Double*, dan *X-Ray Inspection System*, sehingga pemeriksaan barang masih dilakukan secara konvensional.

## B. Saran

1. Peranan injelejen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu diintensifkan, utamanya dalam hal analisis dokumen kepabeanan serta modus operandi tindak pidana kepabeanan sehingga dapat menghasilkan informasi matang atau yang disebut intelejen positif yang dapat digunakan untuk mendeteksi tindak pidana penyelundupan;
2. Meskipun jumlah barang ekspor dan impor di Pelabuhan Hatta Makassar tidak sebanyak di Pelabuhan Tanjung Priok, namun sebaiknya mulai saat ini keberadaan alat bantu pemeriksaan peti kemas berupa *Gamma Ray*, *HI-Co Scan Double*, dan *X-Ray Inspection System* perlu diadakan untuk mengantisipasi jika di masa mendatang kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Hatta Makassar meningkat, mengingat pesatnya perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan, dan Pelabuhan Hatta diharapkan menjadi basis distribusi barang di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamzah. 1988. *Delik Penyelundupan, Disesuaikan dengan INPRES No. 4 Tahun 1985*. CV. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali Purwito. 2007. *Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Ketiga Edisi Revisi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Edi Sutedi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press: Yogyakarta.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penganggulan Kejahatan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- R. Wiryono. 1975. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media: Bandung.

- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang.
- Wangke, Humphrey. Ed. 2011. *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grasindo: Jakarta.

## **Peraturan**

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK. 04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

## **Skripsi**

- Dewiyanti Ratnasari. 2014. *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar. Skripsi*. Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm. 43-66, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9881/DEWIYANTI%20RATNASARI-B11110032.pdf?sequence=1>. (diakses 25 Februari 2016)



- M. Farid Ananda. 2012. *Ananlisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional dalam Kasus Penyelundupan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok*. Skripsi. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321972-S-M.%20Farid%Ananda.pdf> (diakses 24 Februari 2016)
- Muhammad Syaiful K. 2013. *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. Skripsi. Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7105/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUH.SYAIFUL.K.pdf?sequence=1> (diakses 24 Februari 2016)

## **Berita**

- Detik Finance, 6 Juni 2014, <http://finance.detik.com/read/2014/06/06/141640/2601688/4/3-penyebab-terjadinya-penyelundupan-barang-ke-luar-indonesia>
- Detik News, 23 November 2015, <http://news.detik.com/berita/3078201/polres-pelabuhan-tj-priok-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-senilai-rp-43-m>
- Liputan6, 18 Desember 2015, <http://www.liputan6.com/bisnis/read/2393466/impor-pakaian-bekas-bikin-industri-tekstil-ri-lesu-tahun-ini>
- \_\_\_\_\_, 16 Oktober 2015, <http://bisnis.liputan6.com/read/2342030/jokowi-penyelundup-tekstil-impor-ilegal-sudah-jadi-tersangka>
- Metro TV News, 29 Januari 2016, <http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/01/29/476928/4-kontainer-buah-impor-ilegal-diamankan>
- Republika, 5 Februari 2015, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njax3y-bea-cukai-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-sulit-dibendung>
- Solopos, 9 Maret 2016, <http://www.solopos.com/2015/12/01/miras-impor-berkedok-impor-kain-penyelundupan-2-kontainer-miras-digagalkan-666253>

## Sumber Lain

Basuki Suryanto. "Fungsi Kepabeanan." *Artikel Pusdiklat Bea Cukai*, 2008,  
[http://www.bppk.depkeu.go.id/webbbc/images/stories/file/2011/artikel/FUNGSI\\_KEPABEANAN.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webbbc/images/stories/file/2011/artikel/FUNGSI_KEPABEANAN.pdf). Hlm. 1 - 4. (diakses 26 Februari 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.  
<http://www.kbbi.web.id/deviasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.  
<http://www.kbbi.web.id/manifes>

National Crime Prevention Council. 2006. *Crime Prevention Council*,  
<http://www.ncpc.org/training/powerpoint-trainings/crime-prevention-history-and-theory.ppt> (diakses 20 Maret 2016)

Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  
<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html> (diakses 14 Maret 2016)

United Nations Office on Drug and Crime. 2010. *Handbook on the Crime Prevention Guidelines*,  
[https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Crime\\_Prevention\\_Guidelines\\_-\\_Making\\_them\\_work.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf) (diakses 19 Maret 2016)

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR**

JALAN HATTA NOMOR 2 MAKASSAR 90173 KOTAK POS 50 MAKASSAR  
TELEPON (0411) 3615447; FAKSIMILE (0411) 361544; SITUS [www.bcmakassar.beacukai.go.id](http://www.bcmakassar.beacukai.go.id)  
SURAT ELEKTRONIK kppbc\_makassar@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : Ket - 83 /WBC.15/KPP.MP.0101/2016**

**Yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama / NIP** : Muchtian Purwoko / 19791125 200012 1 001  
**Pangkat/Golongan** : Penata Muda Tk. I / III.b  
**Jabatan** : Kepala Subbagian Umum

**Dengan ini menerangkan bahwa :**

**Nama / NIM** : Indah Alfiani / B111 12 325  
**Fakultas / Jurusan** : Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana

adalah benar telah selesai melakukan penelitian pada kantor kami terkait dengan tugas akhir/skripsi yang bersangkutan dengan judul "Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Soekarno-Hatta". Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi pengambilan data penindakan tahun 2012-2016 serta wawancara di Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar  
Pada tanggal 31 Mei 2016  
Kepala Subbagian Umum,



**Muchtian Purwoko**  
**NIP. 19791125 200012 1 001**



Makassar, 30 Mei 2016

**KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin :

nama : Indah Alfiani

NIM : B111 12 325


jurusan : Ilmu Hukum

bagian : Hukum Pidana

telah melakukan penelitian di Terminal Petikemas Makassar melalui Kantor Pengendali Operasi Terminal Petikemas Makassar, selama 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 s.d. 27 Mei 2016.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Supervisor Bagian Perencanaan dan Gate  
Terminal Petikemas Makassar



Effendi

**PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)**

Terminal Petikemas Makassar

Jl. Nusantara No. 329 Makassar 90173 Telepon (0411) 3631287 - 3631290

Fax (0411) 3631285 Kotak Pos 1040 Website : [www.tpk-mks.co.id](http://www.tpk-mks.co.id)



Certificate No. QSC 00700  
QF 54577PMKMS

No. 02-0297-0V

No. 108 Tahun 2016  
REG. DMK3.2014.SK-230